



**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS
TERHADAP LIKUIDITAS PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**ANA SUFIYANTI
3351402576**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 25 Agustus 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Heri Yanto, MBA
NIP. 131658236

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si
NIP. 131411053

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

PERPUSTAKAAN
UNNES

Drs. Sukirman, M.Si
NIP. 131967646

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 06 Oktober 2007

Penguji Skripsi

Drs. Tarsis Tarmudji
NIP. 130529513

Anggota I

Anggota II

Drs. Heri Yanto, MBA
NIP. 131658236

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si
NIP. 131411053

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin M,Si
NIP. 131658236

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Agustus 2007

Ana Sufiyanti
NIM 3351402576



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (QS. Al Baqarah: 45).*
- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS. Alam Nasyrah: 6-8).*
- *Iringilah selalu hidup ini dengan DUIT (Doa, Usaha, Ikhtiar dan Tawakal).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Keluargaku tersayang
Bapak dan Almarhummah Ibu yang senantiasa berdoa, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya untukku.
Kakak-kakakku: Mas Ndoyo, Mbak Yanik, Mas Rosyid, Mbak Ami yang selalu memberikan nasehat, dorongan semangat, doa serta dana.*
- ❖ *Tunanganku Mas Eko Sudaryanto tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, cinta dan kesetiaannya.*
- ❖ *Teman-temanku (Akuntansi '02 dan kost "Wisma Khasanah II") atas dukungan dan semangatmu.*
- ❖ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2006”.

Skripsi ini terselesaikan atas bimbingan, petunjuk, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan terima kasih kepada :

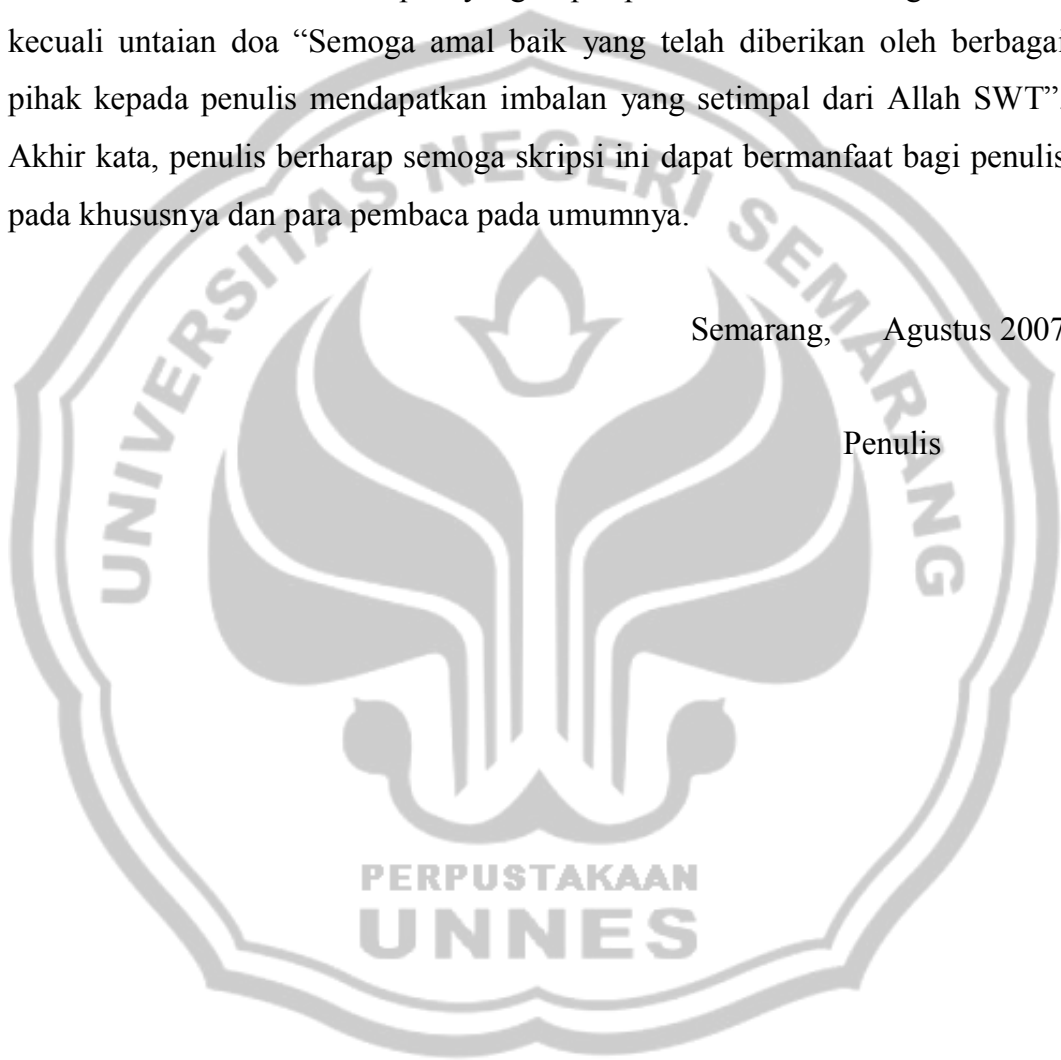
1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sukirman, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Heri Yanto, MBA, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
6. Drs. Tarsis Tarmudji, Dosen Penguji yang telah membantu mengukur kemampuan dalam penguasaan materi dan memberi pengarahan dalam penyelesaian akhir skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Akuntansi, yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama belajar di Universitas Negeri Semarang.
8. Guru-guruku di TK Pertiwi Payaman, SD N 1 Payaman, SMP N 1 Mejobo, SMU N 1 Bae Kudus.
9. Pengurus PKPRI dan KPRI di Kabupaten Kudus yang telah memberikan ijin pada penulis untuk penelitian pada instansi yang dipimpinnya.

10. Bapak dan Almarhummah Ibu, Kakak-kakakku, Keponakanku Dilla Diva Icha, Mas Eko yang telah memberikan dorongan baik moril maupun spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku Sri Astutik, teman-teman Akuntansi '02 & Kost Khasanah II.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan kecuali untaian doa “Semoga amal baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT”. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2007

Penulis



SARI

Ana Sufiyanti. 2007. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.* Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Drs. Heri Yanto, MBA dan Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 138 h.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengendalian Intern Kas, dan Likuiditas.

Ketersediaan kas menjadi sangat penting terkait dengan seluruh kegiatan dan transaksi pada KPRI serta layanan pinjaman pada anggota. Kas sebagai salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Tetapi tidak berarti bahwa koperasi harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar kas berarti semakin banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitasnya. Sebaliknya jika hanya mengejar profitabilitas, akan berusaha agar semua persediaan kas dapat diputar atau dalam keadaan bekerja, berarti menempatkan koperasi dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memiliki berbagai macam unit usaha, sehingga diperlukan pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas dapat dilakukan dalam bentuk efektivitas pengendalian intern kas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian intern kas dan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern kas dan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Populasi penelitian ini adalah seluruh KPRI yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berjumlah 26 KPRI. Pengambilan sampel dengan *total sampling* sebanyak 26 KPRI yang aktif dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada PKPRI. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Efektivitas pengendalian intern kas (X) dan likuiditas (Y). Likuiditas (Y) indikatornya *current ratio* (Y_1), *acid test ratio* (Y_2), dan *cash ratio* (Y_3). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode angket dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, analisis rasio, dan analisis regresi linier sederhana.

Hasil analisis deskriptif persentase diperoleh tingkat efektivitas pengendalian intern penerimaan kas sebesar 59,03 % kategori cukup efektif dan tingkat efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas sebesar 66,86%

kategori cukup efektif. Berdasarkan analisis rasio diperoleh nilai *current ratio* sebesar 559,08% kategori tidak efisien, nilai *acid test ratio* sebesar 549,91% kategori tidak efisien, dan nilai *cash ratio* sebesar 5,45% kategori cukup efisien. Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan garis regresi $\hat{Y} = -2,610 + 0,053X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio* (Y_1). Hal ini terbukti dengan $t_{hitung} = 3,535 > t_{tabel} = 2,056$ dengan tingkat probabilitas signifikansi $0,002 < 0,05$. Melalui analisis regresi linier sederhana *acid test ratio* diperoleh persamaan $\hat{Y} = 0,399 + 0,009X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh signifikan terhadap *acid test ratio* (Y_2). Hal ini terbukti dengan $t_{hitung} = 2,323 > t_{tabel} = 2,056$ dengan tingkat probabilitas signifikansi $0,029 < 0,05$. Melalui analisis regresi linier sederhana *cash ratio* diperoleh persamaan $\hat{Y} = -0,639 + 0,033X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *cash ratio* (Y_3). Hal ini terbukti dengan $t_{hitung} = 1,893 < t_{tabel} = 2,056$ dengan tingkat probabilitas signifikansi $0,070 > 0,05$. Karena harga probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh tersebut tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh secara signifikan efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *cash ratio* (Y_3). Hal ini dikarenakan kas merupakan bagian kecil dari aktiva lancar sehingga sebagian besar didominasi oleh piutang dengan rata-rata di atas 80%. Perencanaan kas belum menjadi kewajiban bagi koperasi. Dan tujuan KPRI adalah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggotanya sehingga tidak terlalu memperhatikan aspek bisnis sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan. Efektivitas pengendalian intern kas memberikan pengaruh terhadap *current ratio* sebesar 34,2%, terhadap *acid test ratio* 18,4%, dan terhadap *cash ratio* 13,0% yang relatif kecil.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran antara lain agar efektivitas pengendalian intern kas perlu ditingkatkan agar tujuan KPRI dapat tercapai secara efektif dan efisien. Likuiditas juga perlu ditingkatkan sampai pada titik yang optimal supaya pihak KPRI dapat memenuhi utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, namun tidak mempunyai dana menganggur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penegasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kas	9
2.1.1 Pengertian Kas	9
2.1.2 Aliran Kas	10
2.1.3 Kas Kecil	10
2.2 Sistem Pengendalian Intern	11
2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern	11
2.2.2 Unsur Pengendalian Intern	13
2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern	16

2.2.4	Keterbatasan Pengendalian Intern	18
2.2.5	Sistem Pengendalian Intern Kas	19
2.3	Likuiditas	35
2.3.1	Pengertian Likuiditas	35
2.3.2	Pengukuran dan Penilaian Likuiditas	36
2.4	Kerangka Berpikir	39
2.5	Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Populasi Penelitian	43
3.2	Sampel Penelitian	43
3.3	Variabel Penelitian	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Validitas dan Reliabilitas Instrumen	50
3.5.1	Validitas	50
3.5.2	Reliabilitas	53
3.6	Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Gambaran Umum KPRI di Kecamatan Kota	61
4.1.2	Deskriptif Variabel Penelitian	66
4.1.3	Analisis Rasio	69
4.1.4	Analisis Regresi	70
4.2	Pembahasan	76
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Standar Rasio Likuiditas	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	46
Tabel 3.2 Uji Validitas Indikator Variabel	52
Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Indikator Variabel	54
Tabel 3.4 Kriteria Deskriptif Persentase	57
Tabel 3.5 Normal Rasio Likuiditas	58
Tabel 3.6 Pencapaian Tingkat Likuiditas KPRI	58
Tabel 4.1 Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Current Ratio</i>	70
Tabel 4.2 Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Acid test Ratio</i>	73
Tabel 4.3 Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Cash Ratio</i>	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian	88
Lampiran 2 Nama-Nama KPRI di kecamatan Kota	92
Lampiran 3 Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Uji Coba	93
Lampiran 4 Contoh Perhitungan Validitas Angket	94
Lampiran 5 Data Efektivitas Pengendalian Intern Kas KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	97
Lampiran 6 Deskripsi Efektivitas Pengendalian Intern Kas KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	98
Lampiran 7 Perhitungan <i>Current Ratio</i> KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	99
Lampiran 8 Perhitungan <i>Acid Test Ratio</i> KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	100
Lampiran 9 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	101
Lampiran 10 Data Likuiditas KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	102
Lampiran 11 Data Variabel Penelitian	103
Lampiran 12 Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Current Ratio</i>	104
Lampiran 13 Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Acid Test Ratio</i>	105
Lampiran 14 Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap <i>Cash Ratio</i>	106
Lampiran 15 Tabel Uji t	107
Lampiran 16 Surat-Surat Perijinan	108
Lampiran 17 Surat Rekomendasi	112
Lampiran 18 Data Neraca KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian di Indonesia memiliki tiga sektor perekonomian, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Lebih lanjut dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa : “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Kedudukan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam rangka pembangunan ekonomi, koperasi berperan mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, kreasi, untuk meningkatkan produktivitas demi tercapainya keadilan dan kemakmuran ekonomi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. KPRI bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dana yang cukup, di antaranya dalam bentuk kas. Hampir semua transaksi dalam koperasi berpengaruh terhadap aliran kas. Aliran kas berlangsung secara terus-menerus selama koperasi beroperasi. Kas dapat diartikan sebagai uang kontan yang ada dalam perusahaan (koperasi) beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas dalam kegiatan operasional diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, membayar dividen, pajak, bunga dan pembayaran lain-lain (Indriyo, 2000:61).

Kas sebagai salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar kas berarti semakin banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitasnya. Sebaliknya kalau perusahaan hanya mengejar profitabilitas saja, akan berusaha agar semua persediaan kas dapat diputar atau dalam keadaan bekerja, berarti menempatkan perusahaan dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan (Riyanto, 2001:94). Karena demikian pentingnya arti kas dalam mendukung likuiditas perusahaan (koperasi) maka perlu adanya pengendalian intern kas agar jumlah kas yang tersedia dapat memenuhi kewajiban finansial.

Pengendalian intern yang baik dapat membantu manajemen dalam menjaga keamanan harta perusahaan dan mencegah serta menemukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan yang dikelola. Sasaran pengendalian intern yang utama adalah melindungi asset perusahaan, memastikan ketepatan dan keandalan data informasi, mendorong efisiensi di semua operasi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jadi dalam rangka membantu kelancaran operasional dari suatu unit usaha, maka jumlah kas yang ada harus terjaga kecukupannya atau memadai (Mulyadi, 1997).

Menurut studi pendahuluan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tergolong sebagai koperasi serba usaha dan telah berstatus hukum. Adapun jenis usaha yang dilakukan KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu meliputi simpan pinjam, usaha pertokoan, foto copy, perkaplingan, dan sebagainya. Namun tidak semua KPRI memiliki semua unit usaha tersebut, sebagian besar usaha mereka adalah unit usaha pertokoan dan unit usaha simpan pinjam. Unit usaha pertokoan menyediakan kebutuhan sehari-hari para anggota. Unit usaha pertokoan tidak hanya melayani anggota saja tapi juga melayani non anggota yaitu masyarakat sekitar KPRI. Dalam unit usaha pertokoan, KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus melakukan penerimaan kas dalam bentuk tunai dan bentuk kredit. Dalam bentuk tunai langsung mendapatkan uang sebelum penyerahan barang, sedangkan dalam bentuk kredit, berarti mempunyai piutang kepada anggotanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tanpa adanya koordinasi yang baik dalam unit usaha tersebut memungkinkan adanya penggelapan kas, karena penerimaan oleh bagian kasir

yang sekaligus merangkap sebagai pembuku kas, selain itu kas tidak langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama pada saat melakukan transaksi. Unit usaha yang paling dominan dalam KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam memberikan pinjaman pada anggota dan menerima simpanan anggota. Dari kedua unit usaha ini KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus melakukan pengelolaan kas. Pengelolaan kas dilakukan agar koperasi selalu memiliki kas yang cukup sehingga jika pihak kreditur sewaktu-waktu menagih hutang-hutangnya koperasi dapat membayarnya karena keadaan kas yang likuid. Dari unit usaha tersebut terlihat bahwa aliran kas selalu terjadi. Aliran kas masuk (*cash inflow*) yakni simpanan dari anggota serta modal dari kreditur pada anggota dan aliran kas keluar (*cash outflow*) yakni peminjaman pada anggota dan pengeluaran yang lain.

Untuk memenuhi kebutuhan para anggota itu koperasi tidak hanya mengandalkan modal sendiri namun juga modal dari luar yaitu dari pihak kreditur. Modal dari kreditur tentunya pada saat tertentu harus dikembalikan, untuk dapat memenuhi kewajiban pada kreditur koperasi harus dalam keadaan likuid. Badan usaha yang mempunyai posisi keuangan yang kuat harus mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya pada waktunya. Pengelolaan kas yang baik akan menjadikan posisi keuangan koperasi yang likuid. Bentuk pengelolaan kas berupa pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas. Likuiditas koperasi menimbulkan citra yang baik di mata kreditur karena koperasi dapat membayar kewajibannya pada saatnya.

Dari uraian kondisi-kondisi KPRI yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan kas pada unit usaha yang ada pada KPRI sehingga KPRI dapat segera memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk membuktikan bahwa pengendalian intern kas yang efektif berpengaruh terhadap likuiditas koperasi maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS TERHADAP LIKUIDITAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pikiran bagi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam hal pelaksanaan pengendalian intern kas.
 - b. Bagi pihak yang berkepentingan, sebagai kajian dalam menilai tentang keadaan likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari dan secara khusus pengetahuan tentang pengendalian intern kas dan likuiditas.
 - b. Bagi peneliti, antara lain sebagai pembandingan antara yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan di lapangan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang lebih relevan.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan menyamakan persepsi terhadap judul penelitian ini perlu dijelaskan pengertian dari istilah yang akan digunakan.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki seseorang, maka perbuatan ini dinyatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dimaksud (Staf Dosen BPA UGM, 1982:67).

Efektivitas yang dimaksud adalah keberhasilan pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

2. Pengendalian Intern

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1997:165).

3. Kas

Kas sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya (Indriyo, 2000:61).

Dalam penelitian ini kas adalah alat pembayaran yang digunakan sebagai penelitian pengendalian intern.

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi (Riyanto, 2001:25).

Dalam penelitian ini likuiditas adalah kemampuan organisasi atau dalam hal ini KPRI untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi.

5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI adalah suatu badan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Pegawai negeri yaitu pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan (Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan bahasa 1989: 658).

KPRI dalam penelitian ini adalah semua KPRI di Kecamatan Kota yang menjadi anggota PKPRI di Kabupaten Kudus.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kas

2.1.1 Pengertian Kas

Kas adalah suatu alat pertukaran yang juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi yang merupakan aktiva paling lancar dan paling sering berubah (Baridwan, 2000:85). Menurut Indriyo (2000:61) kas dapat diartikan sebagai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Sedangkan menurut Mulyadi (1997:447) kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, *certified check*, *chasier check*, cek pribadi dan *bank draft* serta dana yang disimpan di bank yang pengembaliannya tidak dibatasi oleh bank dan perjanjian lainnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang terdiri dari uang tunai (logam dan kertas), surat-surat berharga yang bank-bank bersedia menerimanya, dana yang disimpan di bank, yang kesemuanya dapat dijadikan ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti paling sering berubah jumlahnya.

2.1.2 Aliran Kas

Dalam menjalankan usahanya perusahaan selalu membutuhkan kas baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Proses aliran kas akan berlangsung terus menerus selama hidupnya perusahaan. Dari segi perputarannya, pola kas terdiri dari aliran kas masuk (*cash flow*) dan aliran kas keluar (*cash out flow*).

Aliran kas masuk yang bersifat kontinyu berasal dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Aliran kas masuk yang tidak kontinyu berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Demikian halnya dengan aliran kas keluar ada yang bersifat kontinyu dan tidak kontinyu. Aliran kas keluar yang bersifat kontinyu seperti pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji. Aliran kas keluar yang tidak kontinyu seperti pembayaran bunga, deviden, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, pembelian aktiva tetap dan lain-lain.

2.1.3 Kas Kecil

Pada umumnya perusahaan melakukan pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka diselenggarakan dana dalam bentuk kas kecil. Menurut Zaki Baridwan yang dimaksudkan kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk

membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek (2000:88).

Ada dua macam metode penggunaan kas kecil yaitu metode system imprest dan metode fluktuasi.

1. Metode System Imprest

Dalam metode ini jumlah kas kecil selalu tetap sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil. Cek tersebut kemudian diuangkan ke bank dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil. Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan pada akhir periode, kasir kas kecil meminta pengisian kembali sejumlah uang yang telah di bayar dari kas kecil. Pada waktu pengisian kembali, kasir kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek sebesar pengeluaran yang sudah di bayar.

2. Metode Fluktuasi

Pembentukan dana kas kecil dalam metode ini sama seperti metode imprest. Perbedaannya adalah di dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengisian kembali. Metode fluktuasi mencatat langsung setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil karena pencatatan dilakukan setiap kali terjadi pengeluaran, maka rekening kas kecil akan dikredit sebesar jumlah yang dikeluarkan. Pada saat pengisian kembali rekening kas kecil didebit sebesar uang yang diterima.

2.2 Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Sistem pengendalian Intern menurut Mulyadi adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1997:165). Pengendalian intern menurut IAI (1996:19) sebagaimana tercantum dalam standar profesional akuntan publik adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi (Sunarto, 2003:122).

Berdasarkan definisi pengendalian intern tersebut, terkandung beberapa konsep dasar sebagai berikut :

- a. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian ini merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.
- b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-

formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.

- c. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlu mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.
- d. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

2.2.2 Unsur Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian intern (Mulyadi, 1997:164) yang harus ada dalam suatu perusahaan (koperasi) adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan fungsi merupakan dasar terciptanya suatu pengendalian intern. Pemisahan fungsi ini berarti tidak ada petugas yang melakukan pekerjaan sendiri.

Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bagi seseorang berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan. Pemisahan tugas diimplementasikan dengan

memberikan tanggung jawab otorisasi transaksi, pencatatan transaksi dan penanganan sisi persediaan kepada orang yang berbeda. Untuk mencapai pemisahan tugas, tanggung jawab otorisasi transaksi, pencatatan dan penanganan fisik persediaan dilakukan oleh fungsi-fungsi yang terpisah.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Dalam suatu perusahaan semua transaksi harus dapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transaksi-transaksi tersebut di dalamnya terdiri dari transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Setiap transaksi yang hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi, prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang terekam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan kehandalan yang tinggi.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari manajer yang memiliki wewenang itu. Dengan demikian, di dalam organisasi disusun sistem otorisasi agar dapat ditetapkan manajer yang bertanggung jawab atas terjadinya setiap transaksi, sehingga menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan.

3. Praktik yang sehat.

Salah satu indikator pengendalian intern adalah praktik yang sehat. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Untuk menciptakan praktik yang sehat harus terdapat karyawan yang kompeten dan memiliki kemampuan atau pelatihan yang mendukung tugas mereka. Karyawan merupakan komponen kunci dalam setiap sistem pengendalian intern. Kualifikasi yang ditetapkan dalam setiap posisi pekerjaan dalam perusahaan atau koperasi, harus merefleksi tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan posisi tersebut.

Cara-cara yang ditempuh perusahaan untuk menjamin praktik yang sehat adalah :

- a. Penggunaan formulir berurut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan yang berwenang.

Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak dan hal ini akan dapat digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.

b. Pemeriksaan mendadak (*Surprised audit*).

Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.

Setiap transaksi harus melibatkan pihak lain, sehingga terjadi internal *check* terhadap pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan menurut catatan.

Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, maka harus dilaksanakan pencocokan fisik kekayaan menurut catatan.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997: 178) adalah :

1. Pengendalian intern akuntansi (*Internal accounting control*).

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk :

a. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga untuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik, seperti piutang akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting dan catatan akuntansi tidak dijaga.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan yang andal.

2. Pengendalian intern administratif (*Internal administrative control*).

Pengendalian administratif meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk :

a. Mendorong efisiensi.

Karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan mendorong efisiensi.

b. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipahami oleh karyawan perusahaan atau koperasi.

Sedangkan menurut Amin Widjaya Tunggal (1995:2) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Struktur pengendalian intern dibentuk guna mencegah atau menemukan harta yang hilang.

2. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaannya. Struktur pengendalian intern bertujuan untuk menguji kecermatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.

3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha.

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksudkan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan.

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

2.2.4 Keterbatasan pengendalian intern

Menurut Sunarto (2003:123) ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh pengendalian intern, yaitu :

1. Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali manajemen dan personil lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.

2. Kemacetan.

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personil sementara atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.

3. Kolusi.

Kolusi atau persekongkolan merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa orang untuk tidak mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan dan melakukan kecurangan terhadap kekayaan entitas untuk keperluan pribadi.

4. Pelanggaran oleh manajemen.

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur untuk tujuan tidak sah. Seperti keuntungan pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi nampak baik.

5. Biaya dan manfaat.

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut.

2.2.5 Sistem Pengendalian Intern Kas

Sistem pengendalian intern kas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi berupa kas, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, dan efektivitas penggunaan kas. Bentuk pengelolaan kas berupa pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas.

1. Pengendalian intern penerimaan kas

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.

a. Pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai

Penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan.

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai :

1. Struktur organisasi

Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut :

a) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.

Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek.

b) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Berdasarkan unsur sistem pengendalian intern yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

- c) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi.

Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi. Dengan dilaksanakan setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

- a) Penerimaan order dari pemberi diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.

Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas. Untuk menerima kas dari pembeli dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi.

- b) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.

Dengan cap “lunas” dan pita register kas tersebut dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang pada pembeli.

- c) Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.

Otorisasi di peroleh merchant dengan cara memasukkan kartu kredit pelanggan ke dalam alat tersebut. Dengan alat ini merchant terhindar dari kemungkinan ketidakbonafitan pemegang kartu kredit.

- d) Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.

Cap “sudah diserahkan” yang dibubuhkan oleh fungsi pengiriman pada faktur penjualan tunai membuktikan telah diberikannya barang kepada pembeli yang berhak.

- e) Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sah (valid). Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya

dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

- f) Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu.

Setiap pencatatan kedalam catatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Sehabis karyawan tersebut memutakhirkan catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya perubahan data yang dicatat dalam akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan.

3. Praktik yang sehat

- a) Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.

Untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai

media untuk otorisasi terjadinya transaksi. Salah satu pengawasan formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut.

- b) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya.

Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank.

- c) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern.

Penghitungan kas secara periodik dan mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam penghitungan fisik kas dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan

tunai dan bukti penerimaan kas yang lain (Mulyadi, 1997: 471-474).

b. Pengendalian intern penerimaan kas dari piutang

Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit.

Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang meliputi :

1. Struktur organisasi

- a) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas.

Untuk menciptakan *internal check* fungsi penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dan debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggungjawab untuk melakukan *endorment cek* dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank.

- b) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan, untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi

digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur yang disebut *lapping*.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

- a) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet).

Dengan cek atas nama dan giro bilyet, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan terjamin masuk kedalam rekening giro perusahaan.

- b) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

Dengan demikian fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu.

- c) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan (*remittance advice*) yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek.

3. Praktik yang sehat

- a) Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera.

Secara periodik fungsi pemeriksa intern melakukan penghitungan kas dan hasil perhitungan tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut berita acara penghitungan kas. Selesai dihitung, kas tersebut segera disetor ke bank dalam jumlah penuh.

- b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (*fidelity bond insurance*).

Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu diasuransikan.

- c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (*cash in safe* dan *cash in transit insurance*).

Untuk melindungi kekayaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutup

asuransi *cash in transit*. Untuk melindungi kekayaan kas yang ada ditangan bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi *cash in safe* (Mulyadi, 1997: 490-492).

2. Pengendalian intern pengeluaran kas

Ada dua sistem pengendalian intern yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas yaitu pengendalian intern pengeluaran kas dengan cek dan pengendalian intern pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil.

a. Pengendalian intern pengeluaran kas dengan cek

Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, antara lain :

- 1) Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek.
- 2) Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank. Dengan digunakan cek pada setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank, yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank (*bank statement*) kepada perusahaan nasabahnya.
- 3) Jika sistem perbankan mengembalikan *cancelled check* kepada *check issuer*, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek.

b. Pengendalian intern pengeluaran kas dengan dana kas kecil

Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara : sistem saldo berfluktuasi (*fluctuating fund balance system*) dan imprest system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening saldo kas kecil.
- 2) Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening saldo kas kecil, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi.
- 3) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Dalam sistem saldo berfluktuasi, catatan kas perusahaan tidak dapat direkonsiliasi dengan catatan bank, oleh karena itu rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan kas perusahaan.

Dalam imprest system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil.

- 2) Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (sehingga tidak mengkredit rekening dana kas kecil).
- 3) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Dengan demikian pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu dengan secara periodik atau mendadak menghitung dana kas kecil.

Unsur pengendalian intern dalam pengeluaran kas adalah :

1. Struktur organisasi

- a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya. Dalam sistem kas, fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh bagian kasa harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yang dipegang oleh bagian jurnal, yang menyelenggarakan register cek atau jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Dengan pemisahan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas.

- b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain.

Dalam transaksi kas, bagian kasa adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan fungsi penyimpanan kas. Dengan pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

- a) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.

Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen dan catatan akuntansi yang mutakhir (*up dated*).

- b) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan dibank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.

- c) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat

yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku.

3. Praktik yang sehat

- a) Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.

Saldo kas yang ada di tangan adalah berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari piutang yang belum disetor ke bank (*undeposited cash receipts*). Saldo kas ini perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suatu ruangan yang terpisah.

- b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.

Untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap “lunas” pada bukti

kas keluar beserta dokumen pendukungnya, segera setelah pengiriman cek kepada kreditur dilakukan.

- c) Penggunaan rekening koran bank (*bank statement*) yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.

Rekening koran bank yang diterima secara periodik oleh perusahaan digunakan untuk mengecek ketelitian register cek dan jurnal penerimaan kas dalam kegiatan yang disebut rekonsiliasi bank.

- d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan.

Pembayaran dengan menggunakan cek atas nama dan dengan cara pemindahbukuan ini dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan ini sampai ke alamat yang dituju (tidak ke tangan pribadi penagih atau karyawan perusahaan penerima).

- e) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan *imprest system*.
- f) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan.

Penghitungan fisik kas (*cash count*) yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan penyelewengan penggunaan kas. Penghitungan fisik kas dilakukan terhadap jumlah kas yang belum di setor ke bank dan saldo dana kas kecil yang ada di tangan perusahaan pada saat tertentu.

- g) Kas yang ada di tangan (*cash in safe*) dan kas yang ada diperjalanan (*cash in transit*) diasuransikan dari kerugian.

Jika kas yang ada di tangan dan kas yang ada diperjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau pencurian, perusahaan sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risiko kerugian tersebut.

- h) Kasir diasuransikan (*fidelity Bond Insurance*).

Fidelity Bond Insurance menjamin penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir.

- i) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan.

Umumnya setiap perusahaan menempatkan bagian kasa dalam suatu ruangan yang tidak setiap karyawan diperkenankan melakukan akses kedalamnya, tanpa izin dari pejabat yang

berwenang. Mesin register kas, almari besi dan *strong room* merupakan perlengkapan yang biasanya disediakan bagi bagian kasa untuk melindungi kas yang ada di tangan perusahaan.

- j) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa.

Setiap nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa, karena bagian ini berfungsi untuk mengisi cek (berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatat utang) dan memintakan otorisasi atas cek tersebut. (Mulyadi, 1997:517-522).

2.3 LIKUIDITAS

2.3.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi (Riyanto, 2001:25). Sedangkan menurut S. Munawir (2002:31) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.

Likuiditas dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jumlah alat-alat pembayaran likuid yang dimiliki suatu perusahaan pada saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan.

Menurut S. Munawir (2002:71) suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu :

1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya, yaitu pada waktu ditagih (kewajiban keuangan terhadap pihak ekstern).
2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal (kewajiban keuangan terhadap pihak intern).
3. Membayar bunga dan deviden yang dibutuhkan.
4. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.

2.3.2 Pengukuran dan Penilaian Likuiditas

Untuk mengukur atau menilai tingkat likuiditas suatu perusahaan atau badan usaha dengan menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang digunakan dan berguna untuk menilai dan menggambarkan posisi keuangan dalam menyediakan alat-alat likuid (mudah diuangkan) guna menjamin pengembalian hutang-hutang jangka pendek pada waktunya atau hutang jangka panjang yang telah atau jatuh tempo. Kondisi ini sangat penting bagi pihak luar perusahaan, seperti kreditur dalam menentukan pemberian kredit terhadap koperasi.

Untuk mengukur dan menilai tingkat likuiditas suatu badan usaha atau perusahaan digunakan rasio yaitu :

1. *Current Ratio*

Current Ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Bambang Riyanto menyatakan bahwa *current ratio* kurang dari 2 : 1 secara kasar dianggap kurang baik. Sebab

apabila aktiva lancar turun misalnya sampai lebih dari 50%, maka aktiva lancar tidak cukup lagi untuk menutup utang lancarnya. Pedoman *current ratio* 2 : 1 sebenarnya didasarkan pada prinsip hati-hati. Dengan demikian prinsip *current ratio* 200% bukanlah pedoman yang mutlak, artinya bahwa setiap perusahaan mempunyai ratio minimum yang berbeda-beda, tergantung besarnya ratio umum yang telah ditetapkan.

Current Ratio dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Standar *current ratio* untuk koperasi adalah 125% - 200% (Kep. Ment. Koperasi dan UKM : 129/KEP/MKUKM/XI/2002).

2. *Acid Test Ratio (Quick Ratio)*

Acid test ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas dan sering mengalami fluktuasi harga. Apabila kita menggunakan *acid test ratio* untuk menentukan rasio likuiditas, maka suatu perusahaan yang mempunyai *quick ratio* kurang dari 1 : 1 atau 100%, dianggap kurang baik likuiditasnya (Riyanto, 2001:28).

Acid Test Ratio dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Acid test ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Standar normal *acid test ratio* untuk koperasi adalah 120% (Dep Kop dan PPK RI No: 20/PPK/1997).

3. *Cash Ratio*

Cash ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia. Piutang tidak selalu mudah ditagih, oleh karena itu cenderung untuk dikeluarkan dari perhitungan *cash ratio*. Dengan demikian apabila persediaan dan piutang dikeluarkan dari perhitungan maka tinggal kas di bank. Jadi perhitungannya diperoleh dengan membandingkan antara kas dengan utang jangka pendek.

Cash Ratio dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Simpanan di bank} + \text{Piutang}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Cash Ratio dalam koperasi adalah 10% (Dep Kop dan PPK RI No: 20/PPK/1997).

Untuk mengategorikan tingkat likuiditas pada KPRI digunakan standar pengukuran oleh Departemen Koperasi dan UKM tahun 2002 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Standar Rasio Likuiditas

Likuiditas	Standar	Nilai	Kriteria	Normal
a. Current Ratio	175% - 200%	100	Sangat Efisien	125%-175%
	150% - 174% atau	75	Efisien	
	225% - 249%			
	125% - 49% atau	50	Cukup Efisien	
	250% - 274%			
	<125% atau >275%	0	Kurang Efisien	
b. Quick Ratio	120%			120%
c. Cash Ratio	10%			10%

Sumber : Kep. Ment.Neg.Koperasi dan UKM: 129/KEP/MKUKM/XI/2002

2.4 KERANGKA BERPIKIR

Suatu perusahaan atau badan usaha dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan dana yaitu kas. Kas sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Perusahaan atau badan usaha dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi jika ada sejumlah kas yang memadai didalamnya, sehingga suatu saat membutuhkan dana perusahaan tersebut dapat memenuhi karena tersedianya kas. Karena begitu pentingnya kas bagi keberlanjutan suatu perusahaan, maka perlu dilakukan manajemen kas.

Manajemen kas perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas ketersediaan kas, karena kurang dapat diperkirakan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Proses aliran kas akan berlangsung terus menerus selama hidupnya perusahaan. Aliran kas masuk dan keluar kurang dapat diperkirakan, dan tingkat kepastiannya berbeda-beda, diantara berbagai perusahaan dan industri. Karena itu,

perlu menyimpan uang kas sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi arus kas masuk dan keluar yang bersifat acak dan tidak terduga. Perusahaan yang mempunyai kas dalam jumlah cukup besar mungkin akan terhindar dari kesulitan keuangan. Tetapi jumlah kas yang berlebihan dapat menyebabkan nilai perusahaan berkurang karena *opportunity revenue* yang hilang. Menyimpan kas yang telampau kecil menyebabkan meningkatnya kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya jika perusahaan menyimpan kas yang telampau besar, perusahaan kehilangan peluang untuk melakukan investasi yang menghasilkan pendapatan, namun telah meminimumkan terjadinya kesulitan keuangan.

Menurut Moh. Muslich (2003:99), persoalan pokok dalam manajemen arus kas adalah bagaimana perusahaan mempunyai cukup uang kas untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang timbul. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dua hal yaitu :

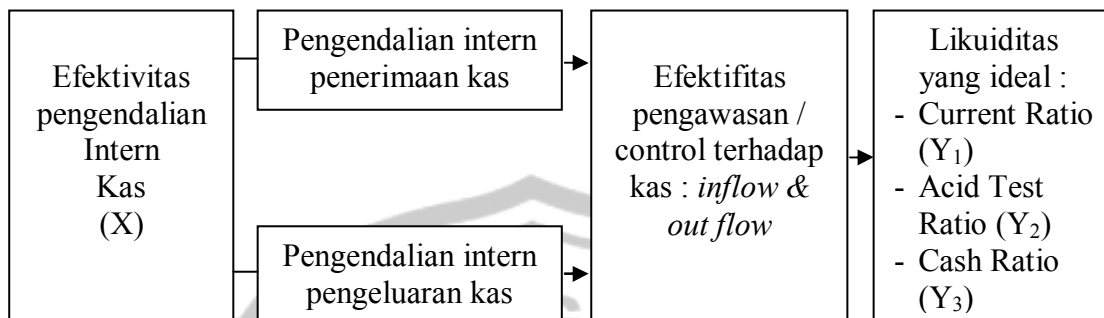
1. Perusahaan harus dapat memprediksi secara tepat jumlah saldo kas untuk suatu periode tertentu.
2. Melakukan sinkronisasi secara tepat penerimaan dan pengeluaran kas.

Dari pendapat Moh. Muslich tersebut dapat dipahami bahwa dalam manajemen kas perlu dilakukan sinkronisasi secara tepat antara penerimaan dan pengeluaran kas. Sinkronisasi yang tepat dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas. Pengendalian intern penerimaan kas menjamin bahwa kas yang masuk akan terkendali dengan semestinya. Penerimaan kas yang masuk dari piutang dan

penjualan tunai akan terkendali dengan aman dengan adanya pengendalian intern. Semua fungsi yang melakukan penerimaan kas, akan melakukan tugasnya dengan benar dan semestinya disebabkan oleh adanya sistem pengendalian intern yang telah diciptakan. Pengendalian intern pengeluaran kas akan menjamin bahwa pengeluaran tersebut adalah benar-benar pada posnya, tidak akan melenceng dari sebenarnya. Karena didalam pengendalian intern pengeluaran kas telah diciptakan sistem pengendalian yang efektif. Dengan adanya pengendalian intern arus kas masuk dan arus kas keluar, maka akan tercipta keteraturan. Sehingga akan terjamin ketersediaan kas apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Menurut Harnanto (1985:173) kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dari suatu perusahaan terletak pada atau diukur dari kemampuannya untuk mendapatkan kas (alat pembayaran), atau kemampuannya untuk mengkonversikan aktiva non kas menjadi kas. Likuiditas suatu perusahaan atau badan usaha ditentukan pula oleh bagaimana perusahaan itu melakukan manajemen kas. Dengan kata lain bahwa dengan adanya manajemen kas yang efektif akan menjamin ketersediaan kas yang cukup. Manajemen kas yang efektif tercipta dari pengendalian intern penerimaan dan pengendalian intern pengeluaran kas. Pengendalian intern kas yang efektif menjamin tersedianya kas yang cukup sehingga apabila sewaktu-waktu perusahaan akan membayar hutang jangka pendek yang jatuh tempo maka perusahaan mampu untuk membayarnya dikarenakan tersedianya jumlah kas yang cukup. Dengan demikian pengendalian intern kas yang efektif menjamin likuiditas perusahaan atau badan usaha.

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas dapat digunakan model penelitian sabagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

2.5 HIPOTESIS

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002:64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Ada pengaruh yang signifikan efektivitas pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002:108). Sedangkan menurut Sugiyono (2000:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sejumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang telah berstatus badan hukum dan menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di Kabupaten Kudus. Menurut data DEPERINDAGKOP Kabupaten Kudus jumlah KPRI di Kecamatan Kota yang menjadi anggota dari PKPRI adalah berjumlah 26 KPRI.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2002:109). Menurut Arikunto bila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi atau *Total Sampling* (Arikunto, 2002:112). Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan

diperlakukan untuk populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2000:56). Hal ini dilakukan dalam penelitian ini, sehingga sampelnya adalah seluruh KPRI di Kecamatan Kota yang aktif dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada PKPRI sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 KPRI.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah apa yang menjadi obyek atau titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto, 2002:94). Objek penelitian yang dimaksud di sini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel Bebas atau *independent variable* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki pengaruhnya. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian intern kas. Bentuk pengelolaan kas berupa pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas.

a. Pengendalian intern penerimaan kas

Indikator :

- Struktur organisasi
- Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
- Praktik yang sehat

b. Pengendalian intern pengeluaran kas

Indikator :

- Struktur organisasi
- Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
- Praktik yang sehat

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau *dependent variable* adalah variabel yang timbul sebagai pengaruh dari variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat (Y) adalah likuiditas. Likuiditas dalam penelitian ini adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, dengan indikator :

- a. *Current Ratio* (Y_1)
- b. *Acid Test Ratio* (Y_2)
- c. *Cash Ratio* (Y_3)

Lebih lanjut definisi operasional variabel penelitian dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis (Arikunto, 2002:135). Metode

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting terutama dokumen-dokumen berupa catatan laporan keuangan pada KPRI sebagai sampel penelitian pada tahun 2006.

2. Metode Angket (Kuesioner)

Metode Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128). Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern kas pada KPRI. Metode angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner tertutup (*close form questioner*) yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan *check list*, yaitu sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (✓) pada jawaban yang sesuai.

Adapun peneliti menggunakan *check list* adalah sebagai berikut :

- a) Tidak memerlukan hadirnya peneliti.
- b) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
- c) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu senggang responden.
- d) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu dalam menjawab.

- e) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

3. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka dipergunakan dalam rangka mengutip dan meringkas beberapa pendapat dari beberapa ahli. Dalam penelitian ini metode pustaka digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan penyusunan skripsi.

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1 Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang di teliti secara tepat (Arikunto, 2002:145).

Sesuai dengan cara pengujiannya ada dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah validitas internal. Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan (Arikunto, 2002:147). Pengujian validitas internal dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Cara pengukuran validitas

dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, dengan rumus korelasi *product moment* oleh pearson :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

dimana :

r_{xy} = Indeks korelasi
 $\sum X$ = Jumlah skor butir
 $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor
 $\sum Y$ = Jumlah skor total
 $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor total
 N = Jumlah responden (Arikunto, 2002:146)

Untuk mengukur variabel efektivitas pengendalian intern kas dilakukan dengan ketentuan responden diharuskan menentukan sendiri pilihan jawabannya dengan membubuhkan tanda *check* (✓) dari empat jawaban yang tersedia. Alternatif jawaban ada 4 dengan skor masing-masing sebagai berikut:

- Alternatif jawaban "Selalu" diberi skor 4
- Alternatif jawaban "Seringkali" diberi skor 3
- Alternatif jawaban "Kadang-kadang" diberi skor 2
- Alternatif jawaban "Tidak" diberi skor 1

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap 20 responden dan setelah dianalisis dengan korelasi *Product Moment* diperoleh angka yang dapat dilihat pada lampiran 4, jika diringkas terangkum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Uji Validitas Indikator Variabel

No	Indikator	α	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
1. Efektivitas pengendalian intern penerimaan kas	1. Faktor 1 - Struktur organisasi	0,05	0,919	0,444	Valid
	2. Faktor 2 - Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan	0,05	0,932	0,444	Valid
	3. Faktor 3 - Praktik yang sehat	0,05	0,762	0,444	Valid
2. Efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas	1. Faktor 1 - Struktur organisasi	0,05	0,539	0,444	Valid
	2. Faktor 2 - Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan	0,05	0,859	0,444	Valid
	3. Faktor 3 - Praktik yang sehat	0,05	0,968	0,444	Valid

Sumber : Hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada pengujian efektivitas pengendalian intern penerimaan kas dan efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas hasil yang diperoleh menunjukkan valid. Hal ini dibuktikan dengan semua nilai hasil r_{xy} pada indikator variabel tersebut diperoleh melebihi nilai r_{tabel} sehingga dengan demikian masing-masing indikator pada masing-masing variabel tersebut dapat dilakukan kepada langkah perhitungan selanjutnya.

3.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabel menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2002:154).

Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas internal karena ukuran atau kriteriumnya sudah terdapat di instrumen.

Untuk menggunakan reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

σ^2 = Varians total

Jika r_{11} hitung $>$ r_{tabel} instrumen maka dikatakan reliabel dan jika

r_{11} hitung $<$ r_{tabel} maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Untuk mencari varians butir digunakan rumus :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x^2) - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

keterangan :

σ = Varians tiap butir

x = Jumlah skor butir

N = Jumlah responden

(Arikunto, 2002:171)

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap dua puluh responden dan setelah dianalisis dengan rumus alpha diperoleh angka sebagai berikut :

Tabel 3.3
Uji Reliabilitas Indikator Variabel

No	Variabel	r_{Alpha}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Efektivitas pengendalian intern penerimaan kas	0,815	0,444	Reliabel
2.	Efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas	0,752	0,444	Reliabel

Sumber : Hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa dari kriteria tersebut di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai r_{alpha} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Dengan demikian hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang memanfaatkan atau menggunakan rumus-rumus atau aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisa terlebih dahulu sehingga bisa ditarik kesimpulannya yang merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, maka metode analisis data yang digunakan adalah :

1. Analisis Deskriptif Persentase

Analisis Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel yang telah diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data mengenai variabel X yang ada dalam penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas pengendalian intern kas KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten kudu. Variabel-variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator yang sangat mendukung dan kemudian indikator tersebut dikembangkan menjadi instrumen (angket).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan analisis tersebut adalah :

- a. Membuat tabel distribusi jawaban angket.
- b. Menentukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden.
- c. Membuat tabulasi data.
- d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai

n = Nilai yang diperoleh (skor hasil)

N = Jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal yang haru dicapai)

(Arikunto, 2002:213)

Hasil perhitungan dari rumus tersebut di atas digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas variabel penelitian sebagai berikut :

a. Pengendalian intern penerimaan kas

- 1) Jumlah responden = 26
- 2) Jumlah item check list = 18
- 3) Persentase maksimal = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
- 4) Persentase minimal = $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$
- 5) Penentuan kriteria = 5 kriteria
- 6) Rentang persentase = $100\% - 25\% = 75\%$
- 7) Interval kelas persentase = $75\% : 5 = 15\%$
- 8) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern kas maka peneliti menetapkan 5 kriteria, yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

b. Pengendalian intern pengeluaran kas

- 1) Jumlah responden = 26
- 2) Jumlah item check list = 15
- 3) Persentase maksimal = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
- 4) Persentase minimal = $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$
- 5) Penentuan kriteria = 5 kriteria
- 6) Rentang persentase = $100\% - 25\% = 75\%$
- 7) Interval kelas persentase = $75\% : 5 = 15\%$
- 8) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern kas maka peneliti menetapkan 5 kriteria, yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

Tabel 3.4
Kriteria Deskriptif Persentase

No.	Rentang Persentase	Skor	Kriteria
1.	85,00% - 100,00%	5	Sangat Efektif
2.	70,00% - 84,99%	4	Efektif
3.	55,00% - 69,99%	3	Cukup Efektif
4.	40,00% - 54,99%	2	Kurang Efektif
5.	25,00% - 39,99%	1	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah

2. Analisis Rasio

Analisis rasio adalah analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar kuantitatif yang disajikan dalam neraca maupun rugi laba. Dalam penelitian ini menggunakan analisis likuiditas sebagai berikut :

a. *Current Ratio*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Acid Test Ratio*

$$\text{Acid test ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

c. *Cash Ratio*

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Simpanan di bank} + \text{Piutang}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan likuiditas bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Untuk mengkategorikan tingkat likuiditas yang ada pada KPRI digunakan Standar Pengukuran oleh Departemen Koperasi dan UKM tahun 2002 (Kep No. 129/KEP/MKUKM/XI/2002) sebagai berikut :

Tabel 3.5
Normal Rasio Likuiditas

No.	Kemampuan	Standar
1.	Current Ratio	125% - 200%
2.	Acid Test Ratio	120%
3.	Cash Ratio	10%

Sumber : Dep Kop dan PPK RI No: 20/PPK/1997 & Kep.Ment.Neg. Koperasi dan UKM: 129/KEP/MKUKM/XI/2002

Berdasarkan standar pengukuran tersebut kemudian dibuat skor dari pencapaian tiap-tiap indikator.

Tabel 3.6
Pencapaian Tingkat Likuiditas KPRI

Rasio	Pencapaian	Skor	Kriteria
Current Ratio	183%-200% atau 201%-219%	5	Sangat Efisien
	164%-182% atau 220%-238%	4	Efisien
	145%-163% atau 239%-257%	3	Cukup Efisien
	126%-144% atau 258%-276%	2	Kurang Efisien
	< 125% atau > 277%	1	Tidak Efisien
Acid Test Ratio	97%-120% atau 121%-144%	5	Sangat Efisien
	73%-96% atau 145%-168%	4	Efisien
	49%-72% atau 169%-192%	3	Cukup Efisien
	25%-48% atau 193%-216%	2	Kurang Efisien
	< 24% atau > 217%	1	Tidak Efisien
Cash Ratio	8,4%-10% atau 10,1%-11,6%	5	Sangat Efisien
	6,8%-8,3% atau 11,7%-13,2%	4	Efisien
	5,2%-6,7% atau 13,3%-14,8%	3	Cukup Efisien
	3,6%-5,1% atau 14,9%-16,4%	2	Kurang Efisien
	< 2,0% atau > 16,5%	1	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah

Dalam penelitian ini, jumlah penskoran dari tiap-tiap indikator variabel likuiditas (Y) dijadikan sebagai dasar mengolah data untuk persiapan analisis regresi.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

a. Analisis regresi

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model dalam analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Adapun alasan penggunaan analisis ini adalah untuk menunjukkan hubungan pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap likuiditas (Y). Selain itu untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Persamaan regresi linier sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Likuiditas

a = Bilangan konstanta

b = Koefisien regresi

X = Efektivitas Pengendalian Intern Kas

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t Statistik)

Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Pengujian dilaksanakan dengan pengujian dua arah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara t_{tabel} dan t_{hitung}
 - a. Bila $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.
 - b. Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

- 2) Berdasarkan probabilitas

Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α) maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas, jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

- c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

(Sudjana, 2002:310)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

a. Keberadaan KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

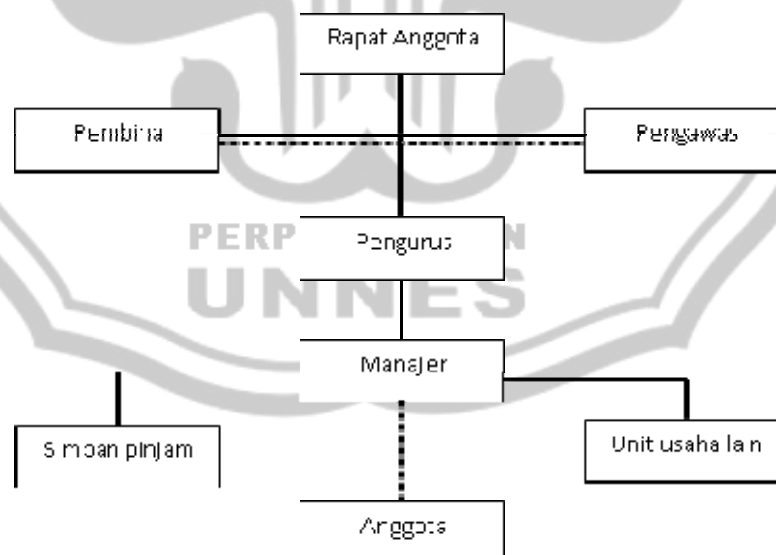
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berdiri karena dorongan akan adanya kebutuhan para pegawai negeri. Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) diharapkan dapat membantu dan meringankan pegawai negeri dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Namun tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk wadah untuk mendidik anggotanya agar tumbuh menjadi insan koperasi yang loyal. Sedangkan dari segi sosial diharapkan juga dapat terjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat diantara para anggotanya dan juga masyarakat sekitarnya.

Objek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI di Kecamatan Kota yang menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di Kabupaten Kudus yang berjumlah 26 KPRI. Seluruh KPRI tersebut telah terdaftar sebagai koperasi primer pada DEPERINDAGKOP Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 26 KPRI yang dijadikan sampel.

b. Struktur Organisasi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Organisasi merupakan wadah kerjasama dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggung jawab, pengelompokkan suatu kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Agar organisasi suatu KPRI dapat berjalan dengan baik, perlu penyusunan dalam suatu struktur organisasi sehingga antar bagian yang satu dengan bagian yang lain dapat melaksanakan tugasnya sesuai pekerjaan masing-masing. Struktur organisasi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada umumnya berbentuk lini dan staf karena mempunyai kelebihan adanya disiplin kerja dan keputusan rapat dapat diambil melalui pertimbangan yang baik. Struktur organisasi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus



Sumber : Data dinding KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Keterangan :

————— = Garis wewenang, tanggung jawab dan bimbingan

----- = Garis koordinasi

----- = Pelayanan

Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPRI. Keputusan rapat sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dan rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan badan mengenai pengelolaan usaha KPRI. Pelaksanaan rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun dan untuk menyelenggarakan pengesahan pertanggungjawaban diselenggarakan paling lambat dua bulan setelah tahun buku terakhir.

Pengurus

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha KPRI kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Pengurus dapat mengangkat pengelola KPRI atau manajer untuk mengelola usaha KPRI. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Pengawas

Pengawas KPRI adalah orang-orang sebagai anggota yang diberi kepercayaan oleh seluruh anggota untuk mengadakan atau melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha KPRI. Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali pengawas melakukan penelitian dan pembinaan pada kegiatan

organisasi dan usaha KPRI yang hasilnya dilaporkan kepada pengurus secara tertulis dan salinannya dikirimkan kepada Dinas Koperasi. Pengawas juga mengikuti rapat dengan pengurus dalam langkah-langkah pengembangan usaha KPRI serta mengadakan rapat lengkap badan pengawas secara rutin untuk menghimpun materi dalam laporan baik triwulan maupun tahunan.

Manajer

Manajer adalah sebagai pelaksana tugas pengurus sehari-hari di bidang usaha koperasi. Tugas manajer adalah melaksanakan kegiatan usaha-usaha yang dipercayakan oleh pengurus, memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan karyawan yang berada di bawah kepemimpinannya, mengatur jalannya keuangan dalam usaha koperasi serta mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada pengurus. Bila suatu saat manajer berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka diambil alih oleh pengurus atau seseorang yang ditunjuk oleh pengurus.

c. Bidang Usaha KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Untuk mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus melakukan berbagai kegiatan usaha. Adapun jenis usaha yang dilakukan KPRI di Kecamatan Kota diantaranya adalah simpan pinjam, pertokoan, aneka jasa dan sebagainya. Namun tidak semua KPRI memiliki usaha tersebut. Jenis usaha yang ada pada KPRI tersebut yaitu :

1. Simpan pinjam

Simpan pinjam terdiri dari :

a) Tabungan

Merupakan simpanan dari anggota dan simpanan tersebut sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan. Simpanan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Bunga simpanan disesuaikan dengan bunga bank pada umumnya.

b) Piutang uang jangka panjang

Merupakan pinjaman uang kepada anggota dengan mengajukan permohonan dimana sumber dana berasal dari simpanan anggota, piutang diangsur setiap bulan.

c) Piutang uang jangka pendek

Merupakan piutang uang yang jangka waktu angsurannya kurang dari 15 bulan.

d) Piutang sebrakan

Merupakan pinjaman uang kepada anggota dengan mengajukan permohonan pada saat itu juga. Sumber dana pinjaman berasal dari simpanan anggota dengan ketentuan diangsur 1 (satu) kali yaitu bulan berikutnya setelah menerima pinjaman.

2. Pertokoan

Usaha pertokoan menyediakan kebutuhan barang-barang anggota dan bukan anggota. Barang yang disediakan berupa kebutuhan sehari-hari

(konsumsi), pakaian, alat tulis kantor, dan sebagainya. Pembeli yang ada sebagian besar merupakan anggota.

3. Aneka Jasa

a) Fotocopy

Dalam usaha jasa fotocopy melayani instansi yang terkait dan masyarakat secara umum, tetapi kebanyakan para pemakai atau pelanggan fotocopy ini dari kalangan sendiri atau instansi terkait.

b) Jasa perkaplingan

Jasa perkaplingan ini melayani anggota dari KPRI yang bersangkutan. Jasa perkaplingan ini melayani anggota yang membutuhkan tanah dengan cara kredit.

c) Wartel

Jasa wartel ini melayani anggota dari KPRI yang bersangkutan dan juga dari non anggota berupa fasilitas telepon umum.

d) Pembayaran rekening listrik dan PAM

Jasa ini melayani pembayaran listrik dan PAM dari anggota dengan dikenakan biaya Rp 1500,00.

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian intern kas. Bentuk pengelolaan kas berupa pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas.

a. Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Berdasarkan hasil perhitungan tentang efektivitas pengendalian intern penerimaan kas yang dinyatakan dalam persentase (%) pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat dilihat pada (Lampiran 6). Perhitungan variabel tingkat efektivitas pengendalian intern penerimaan kas adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1105}{1872} \times 100\%$$

$$\% = 59,03\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat efektivitas pengendalian intern penerimaan kas sebesar 59,03% dan termasuk dalam kategori cukup efektif. Untuk analisis faktornya sebagai berikut :

1) Struktur Organisasi

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 291 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas 1105. Pada sub variabel struktur organisasi menyumbangkan nilai sebesar 26,33% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas.

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

Dalam sub variabel ini, data yang diperoleh skor 495 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas 1105. Pada sub variabel sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menyumbangkan nilai sebesar 44,80% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas.

3) Praktik yang sehat

Dalam sub variabel ini, data yang diperoleh skor 319 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas 1105. Pada sub variabel praktik yang sehat menyumbangkan nilai sebesar 28,87% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern penerimaan kas.

b. Efektivitas Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Berdasarkan hasil perhitungan tentang efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas yang dinyatakan dalam persentase (%) pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat dilihat pada (Lampiran 6). Perhitungan variabel tingkat efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1043}{1560} \times 100\%$$

$$\% = 66,86\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas sebesar 66,86% dan termasuk dalam kategori cukup efektif. Untuk analisis faktornya sebagai berikut :

1) Struktur Organisasi

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 160 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas 1043. Pada sub variabel struktur organisasi

menyumbangkan nilai sebesar 15,34% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas.

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

Dalam sub variabel ini, data yang diperoleh skor 228 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas 1043. Pada sub variabel sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menyumbangkan nilai sebesar 21,86% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas.

3) Praktik yang sehat

Dalam sub variabel ini, data yang diperoleh skor 655 (Lampiran 5) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas 1043. Pada sub variabel praktik yang sehat menyumbangkan nilai sebesar 62,80% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas.

4.1.3 Analisis Rasio

Berdasarkan hasil analisis rasio diperoleh nilai likuiditas untuk masing-masing Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Lampiran 10). Dari nilai likuiditas tersebut kemudian dibuat rata-rata untuk dikategorikan, kemudian dibandingkan dengan Standar Kinerja Koperasi yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2002. Hasil dari analisis rasio menunjukkan nilai *current ratio* KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebesar 14536,05% termasuk dalam kategori tidak

efisien. Hal ini dikarenakan nilai tersebut berada di atas standar rasio yang telah ditetapkan yaitu antara 125%-200%. Nilai *acid test ratio* KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebesar 14297,58% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan nilai tersebut berada di atas standar rasio yang telah ditetapkan yaitu 120%. Nilai *cash ratio* KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah sebesar 141,75% dan termasuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini karena nilai tersebut termasuk dalam standar rasio yang telah ditetapkan yaitu 10%. Berdasarkan analisis rasio yang telah diperoleh nilai *current ratio* sebesar 559,08% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Nilai *acid test ratio* sebesar 549,91% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Nilai *cash ratio* sebesar 5,45% dan termasuk dalam kategori cukup efisien.

4.1.4 Analisis Regresi

a. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Current Ratio*

1. Persamaan garis regresi

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *current ratio* digunakan analisis regresi linier sederhana. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 12.0 for Windows* maka menghasilkan *output* yang dapat dilihat pada lampiran 12, jika diringkas seperti terangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas
terhadap *Current Ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	- 2,610
Koefisien regresi	0,053
t _{hitung}	3,535
Signifikansi	0,002
Koefisien Determinasi (R ²)	0,342

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 12

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu: $\hat{Y} = -2,610 + 0,053X$. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a) Konstanta = -2,610

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas = 0, maka *current ratio* akan menjadi -2,610.

b) Koefisien X = 0,053

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan *current ratio* sebesar 0,053 satuan dengan konstanta -2,610 satuan.

2. Uji t

Untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis diterima, maksudnya adalah regresi berarti atau terbukti. Dengan terbuktinya perhitungan keberartian regresi, maka hipotesis yang

berbunyi “Ada Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Current Ratio* di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus” diterima. Sebaliknya apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka hipotesis ditolak, maksudnya regresi tidak berarti atau tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya perhitungan keberartian regresi, maka hipotesis yang berbunyi “Ada Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Current Ratio* di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus” ditolak.

Dari hasil perhitungan didapat t_{hitung} sebesar 3,535 dan t_{tabel} sebesar 2,056 karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} hal ini dapat dikatakan bahwa koefisien regresi berarti atau ada pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *current ratio* (Y_1) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dari probabilitas value juga dapat dilihat bahwa P value sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *current ratio* (Y_1) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dimana setiap kenaikan variabel efektivitas pengendalian intern kas sebesar 1 satuan maka akan diikuti kenaikan variabel *current ratio* sesuai dengan besarnya koefisien regresi yaitu sebesar 0,053.

3. Besarnya pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *current ratio* di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebesar 0,342.

Dari hasil perhitungan didapat R square sebesar 0,342. Hal ini berarti 34,2% perubahan yang terjadi pada *current ratio* dapat dijelaskan

oleh efektivitas pengendalian intern kas. Sedangkan sisanya (100% - 34,2% = 65,8%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

b. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Acid Test Ratio*

1. Persamaan garis regresi

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *acid test ratio* digunakan analisis regresi linier sederhana. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 12.0 for Windows* maka menghasilkan *output* yang dapat dilihat pada lampiran 13, jika diringkas seperti terangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Acid Test Ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	0,399
Koefisien regresi	0,009
t_{hitung}	2,323
Signifikansi	0,029
Koefisien Determinasi (R^2)	0,184

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 13

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu: $\hat{Y} = 0,399 + 0,009X$. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a) Konstanta = 0,399

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas = 0, maka *acid test ratio* akan menjadi sebesar 0,399.

b) Koefisien $X = 0,009$

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan *acid test ratio* sebesar 0,009 satuan dengan konstanta 0,399 satuan.

2. Uji t

Dari hasil perhitungan didapat t_{hitung} sebesar 2,323 dan t_{tabel} sebesar 2,056 karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} hal ini dapat dikatakan bahwa koefisien regresi berarti ada pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *acid test ratio* (Y_2) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dari probabilitas value juga dapat dilihat bahwa P value sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *acid test ratio* (Y_2) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dimana setiap kenaikan variabel efektivitas pengendalian intern kas sebesar 1 satuan maka akan diikuti kenaikan variabel *acid test ratio* sesuai dengan besarnya koefisien regresi yaitu sebesar 0,009.

3. Besarnya pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *acid test ratio* di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebesar 0,184.

Dari hasil perhitungan didapat R square sebesar 0,184. Hal ini berarti 18,4% perubahan yang terjadi pada *acid test ratio* dapat dijelaskan oleh efektivitas pengendalian intern kas. Sedangkan sisanya ($100\% - 18,4\% = 81,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

c. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Cash Ratio*

1. Persamaan garis regresi

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *cash ratio* digunakan analisis regresi linier sederhana. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 12.0 for Windows* maka menghasilkan *output* yang dapat dilihat pada lampiran 14, jika diringkaskan seperti terangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Ringkasan Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Cash Ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	- 0,639
Koefisien regresi	0,033
t hitung	1,893
Signifikansi	0,070
Koefisien Determinasi (R^2)	0,130

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 14

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu: $\hat{Y} = -0,639 + 0,033X$. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a) Konstanta = -0,639

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas = 0, maka *cash ratio* akan menjadi -0,639.

b) Koefisien $X = 0,033$

Jika variabel efektivitas pengendalian intern kas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan *cash ratio* sebesar 0,033 satuan dengan konstanta -0,639 satuan.

2. Uji t

Dari hasil perhitungan didapat t_{hitung} sebesar 1,893 dan t_{tabel} sebesar 2,056 karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} hal ini dapat dikatakan bahwa koefisien regresi tidak berarti atau tidak ada pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *cash ratio* (Y_3) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dari probabilitas value juga dapat dilihat bahwa P value sebesar 0,070 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *cash ratio* (Y_3) di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

3. Besarnya pengaruh efektivitas pengendalian intern kas terhadap *cash ratio* di KPRI Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebesar 0,130.

Dari hasil perhitungan didapat R square sebesar 0,130. Hal ini berarti 13,0% perubahan yang terjadi pada *cash ratio* dapat dijelaskan oleh efektivitas pengendalian intern kas. Sedangkan sisanya ($100\% - 13,0\% = 87,0\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern kas terdiri dari efektivitas pengendalian intern penerimaan kas dalam kategori cukup efektif dan efektivitas pengendalian intern

pengeluaran kas dalam kategori cukup efektif. Persentase efektivitas pengendalian intern penerimaan kas adalah 59,03% dan efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas adalah 66,86%.

Efektivitas pengendalian intern penerimaan kas dengan indikator struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat. Untuk indikator struktur organisasi menyumbangkan nilai sebesar 26,33%. Indikator sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menyumbangkan nilai sebesar 44,80% serta indikator praktik yang sehat menyumbangkan nilai sebesar 28,87%. Dari analisis ini diketahui bahwa KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memiliki efektivitas pengendalian intern penerimaan kas cukup efektif.

Efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas dengan indikator struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat. Untuk indikator struktur organisasi menyumbangkan nilai sebesar 15,34%. Indikator sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menyumbangkan nilai sebesar 21,86% serta indikator praktik yang sehat menyumbangkan nilai sebesar 62,80%. Dari analisis ini diketahui bahwa KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memiliki efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas yang cukup efektif.

Berdasarkan hasil analisis rasio masing-masing KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menunjukkan nilai rata-rata nilai *current ratio* sebesar 559,08%, nilai *acid test ratio* sebesar 549,91%, nilai *cash ratio* sebesar 5,45%.

Dari hasil analisis rasio *current ratio* menunjukkan nilai 559,08%. Peranan *current ratio* dalam likuiditas menunjukkan hubungan perbandingan antara aktiva lancar terhadap utang lancar. *Current ratio* memperhitungkan kemampuan KPRI

dalam memenuhi utang lancarnya sehingga jika ditinjau dari *current ratio*-nya KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam kategori tidak efisien, artinya jika sewaktu-waktu pihak kreditur menginginkan pembayaran terhadap utang lancar KPRI tidak dapat memenuhinya dengan segera.

Hasil analisis rasio *acid test ratio* menunjukkan nilai 549,91%. Peranan *acid test ratio* dalam likuiditas menunjukkan hubungan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan terhadap utang lancar. *Acid test ratio* memperhitungkan kemampuan KPRI dalam memenuhi utang lancarnya sehingga jika ditinjau dari *acid test ratio*-nya KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam kategori tidak efisien, artinya jika sewaktu-waktu pihak kreditur menginginkan pembayaran terhadap utang lancar KPRI tidak dapat memenuhinya dengan segera.

Dari hasil analisis rasio *cash ratio* menunjukkan nilai 5,45%. Peranan *cash ratio* dalam likuiditas menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar, simpanan di bank, dan piutang terhadap utang lancar. *Cash ratio* memperhitungkan kemampuan KPRI dalam memenuhi utang lancarnya sehingga jika ditinjau dari *cash ratio*-nya KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam kategori cukup efisien, artinya jika sewaktu-waktu pihak kreditur menginginkan pembayaran terhadap utang lancar, maka KPRI cukup dapat memenuhinya dengan segera.

Melalui analisis regresi linier sederhana *current ratio* diperoleh persamaan $\hat{Y} = -2,610 + 0,053X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh terhadap *current ratio* (Y_1). Berdasarkan analisis regresi *SPSS 12.0 for Windows* (lampiran 12) dapat diketahui $t_{hitung} = 3,535$ dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,002 jauh di bawah 0,05. Karena

harga probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh tersebut signifikan sehingga terdapat pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *current ratio* (Y_1). Sedangkan $R^2 = 0,342$ artinya variabel efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh terhadap variabel *current ratio* (Y_1) sebesar 34,2% dan sisanya 65,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Melalui analisis regresi linier sederhana *acid test ratio* diperoleh persamaan $\hat{Y} = 0,399 + 0,009X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh terhadap *acid test ratio* (Y_2). Berdasarkan analisis regresi *SPSS 12.0 for Windows* (lampiran 13) dapat diketahui $t_{hitung} = 2,323$ dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,029 jauh di bawah 0,05. Karena harga probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh tersebut signifikan sehingga terdapat pengaruh efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *acid test ratio* (Y_2). Sedangkan $R^2 = 0,184$ artinya variabel efektivitas pengendalian intern kas (X) berpengaruh terhadap variabel *acid test ratio* (Y_2) sebesar 18,4% dan sisanya 81,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Melalui analisis regresi linier sederhana *cash ratio* diperoleh persamaan $\hat{Y} = -0,639 + 0,033X$. Dari persamaan regresi tersebut berarti efektivitas pengendalian intern kas (X) tidak berpengaruh terhadap *cash ratio* (Y_3). Berdasarkan analisis regresi *SPSS 12.0 for Windows* (lampiran 14) dapat diketahui $t_{hitung} = 1,893$ dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,070 di atas 0,05. Karena harga probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung}

yang diperoleh tersebut tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh secara signifikan efektivitas pengendalian intern kas (X) terhadap *cash ratio* (Y_3). Sedangkan $R^2 = 0,130$ artinya 13,0% perubahan yang terjadi pada *cash ratio* dapat dijelaskan oleh efektivitas pengendalian intern kas sedangkan sisanya 87,0% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Ada indikasi bahwa: Kas merupakan bagian kecil dari aktiva lancar sehingga sebagian besar didominasi oleh piutang, kemungkinan untuk membayar utang dalam jangka pendek tidak mencukupi karena keadaan aktiva lancar kurang likuid, meskipun pengendalian intern kasnya cukup efektif. Tingginya tingkat piutang ini terkait dengan KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagian besar memberikan layanan simpan pinjam bagi anggotanya. Kondisi piutang yang tinggi akan memberikan dampak terhadap perubahan kas dalam kurun waktu relatif lama, sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan lainnya. Perencanaan kas belum menjadi kewajiban bagi koperasi. Tujuan KPRI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya, sehingga tidak begitu memperhatikan aspek bisnis sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan pengendalian intern kas tidak memberikan pengaruh langsung terhadap *cash ratio* yang diperoleh.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dan hasil analisis rasio KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam keadaan illikuid. Artinya KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tidak mempunyai alat likuid atau alat pembayaran yang cukup besarnya untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dipenuhi. Dengan diterapkannya pengendalian intern kas yang

efektif diharapkan KPRI dalam keadaan likuid, dimana KPRI mempunyai alat likuid atau alat pembayaran yang cukup besarnya untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dipenuhi. Untuk mencapai keadaan likuid bisa ditempuh dengan cara membuat kebijakan baru tentang struktur modal dengan penambahan asset koperasi dan memperkuat alat-alat likuid sehingga bisa diperoleh sisa hasil usaha yang maksimal.

Berdasarkan analisis regresi liner sederhana dapat dipahami bahwa efektivitas pengendalian intern kas secara signifikan mempengaruhi *current ratio* dan *acid test ratio*. Efektivitas pengendalian intern penerimaan kas yang masuk dari penjualan tunai dan piutang akan aman karena adanya struktur organisasi dengan adanya fungsi-fungsi yang menjalankan tugasnya secara benar. Pemisahan fungsi tersebut antara lain fungsi penjualan terpisah dari fungsi kas, fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi, fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penagihan, transaksi penjualan dilaksanakan lebih dari satu fungsi. Pemisahan tugas antar fungsi untuk menghindari akuntan KPRI untuk melakukan kecurangan yaitu dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Sehingga adanya pemisahan tugas antar fungsi tersebut menjaga kekayaan koperasi dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi oleh berbagai fungsi akan tercipta adanya pelaksanaan pengecekan secara intern pekerjaan setiap fungsi oleh fungsi yang lain. Adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik meliputi adanya penerimaan order dari pembeli di otorisasi dengan faktur penjualan, otorisasi fungsi penerimaan kas membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai,

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai, otorisasi pada saat pencatatan ke dalam buku jurnal, otorisasi pada karyawan dalam mencatat transaksi dan pembuatan daftar tagihan piutang oleh fungsi akuntansi, maka akan menjamin jumlah kas yang ada sesuai dengan catatan. Catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh karyawan yang diberi wewenang menjamin catatan akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kali ada pencatatan harus diberi tanggal pencatatan dan membubuhkan tanda tangan. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi, sehingga fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang kemudian menggunakan hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Adanya praktik yang sehat tercipta dari penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi, jumlah uang kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan tanggal terjadi transaksi atau hari kerja berikutnya, sehingga akan menguji ketelitian dan keandalan data akuntansi (jurnal kas KPRI). Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik diperiksa secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern untuk mengurangi resiko pengeluaran kas yang diterima oleh kasir, diperlukan juga mengasuransikan penerimaan dana kas. Dengan adanya efektivitas pengendalian intern kas yang diciptakan oleh pihak KPRI maka akan menjamin kas untuk selalu aman dari berbagai hal kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas selalu dapat diawasi.

Efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas tercipta dari adanya struktur organisasi yang sehat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat. Dalam organisasi yang sehat memiliki pemisahan tugas antar fungsi. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kassa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari pihak yang lain. Dengan adanya pelaksanaan pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi, maka kas KPRI terjamin ketelitian dan keandalannya. Pengeluaran kas mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan bukti kas yang keluar ini kas berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga tidak sah untuk kepentingan pribadi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang diciptakan oleh KPRI menutup kemungkinan pencurian terhadap kas, sehingga kas yang ada menjadi aman. Saldo kas yang ada di tangan dilindungi dari pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya dengan cara menyimpannya dalam almari besi dan menempatkan kasir di dalam ruangan yang terpisah. Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan maka bagian kassa dilengkapi dengan alat-alat yang memadai. Alat yang memadai tersebut dapat berupa mesin register kas, almari besi dan sebagainya dan yang merupakan perlengkapan bagian kassa untuk melindungi kas yang ada. Praktik yang sehat dalam hal ini dapat meliputi melaksanakan adanya suatu pengaman terhadap saldo kas di tangan, membubuhkan cap “lunas” pada dokumen transaksi, pengecekan pada penggunaan rekening koran, adanya pengecekan apabila menggunakan cek, pengeluaran dengan sistem dana kas kecil, melakukan pencocokan kas di tangan

dengan catatan akuntansi, mengasuransikan kas di tangan dan kas dalam perjalanan serta kasir, memberi alat pengaman pada kasir, dan adanya pertanggungjawaban nomor rekening, dengan adanya praktik yang sehat akan memungkinkan kas yang ada pada KPRI akan aman dari kemungkinan yang tidak diinginkan dan pengeluaran kas benar-benar sesuai dengan posnya.

Apabila pihak koperasi melaksanakan serangkaian konsep pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas tersebut di atas maka dapat mendukung likuiditas dalam arti dengan adanya hal tersebut akan terjadi internal kontrol terhadap penerimaan dan pembayaran kas yang menunjang likuiditas sebagai kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya pada saat ditagih sebab dalam hal ini antara lain terkait pada modal yang diperoleh koperasi antara lain dari pihak kreditur. Dengan likuiditas yang baik sebagai salah satu alat analisis yang datanya harus akurat dan dapat diandalkan maka akan mencerminkan citra yang baik pada koperasi tersebut.

Hal ini mengindikasikan secara empiris dapat dipahami bahwa dengan adanya efektivitas pengendalian intern kas yang berupa pelaksanaan konsep pengendalian intern yang baik yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat akan berpengaruh baik pada likuiditas koperasi sebagai kemampuan koperasi dalam membayar dihubungkan dengan pihak luar (kreditur) sebagai likuiditas badan usaha dalam dimensi waktu 2006 dan dimensi tempat pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Likuiditas sebagai alat analisis yang datanya akurat dan dapat diandalkan sehingga menimbulkan citra positif bagi koperasi terbukti adanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan hasil penelitian tentang efektivitas pengendalian intern kas terhadap likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Efektivitas pengendalian intern kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdiri dari pengendalian intern penerimaan kas yang termasuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 59,03% dan pengendalian intern pengeluaran kas yang termasuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 66,86%.
2. Nilai *current ratio* sebesar 559,08% dalam kategori tidak efisien. *Acid test ratio* sebesar 549,91% dalam kategori tidak efisien. Dan *cash ratio* sebesar 5,45% dalam kategori cukup efisien.
3. Efektivitas pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio* dan *acid test ratio*, sedangkan terhadap *cash ratio* tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan kas merupakan bagian kecil dari aktiva lancar sehingga sebagian besar didominasi oleh piutang dengan rata-rata di atas 80%, perencanaan kas belum menjadi

kewajiban bagi koperasi, dan tujuan KPRI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggotanya sehingga tidak terlalu memperhatikan aspek bisnis sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan.

4. Efektivitas pengendalian intern kas memberikan pengaruh terhadap *current ratio* sebesar 34,2%, terhadap *acid test ratio* 18,4%, dan terhadap *cash ratio* 13,0% yang relatif kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus hendaknya meningkatkan efektivitas pengendalian intern kas sehingga sewaktu-waktu harus membayar utang jangka pendeknya pada pihak kreditur maka KPRI mampu memenuhinya tepat waktu.
2. Likuiditas perlu ditingkatkan pada titik yang optimal supaya pihak KPRI dapat memenuhi utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, namun tidak mempunyai dana menganggur.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS

TERHADAP

LIKUIDITAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

(KPRI) KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

A. Identitas Responden

1. Nama KPRI :
2. No Badan Hukum :
3. Alamat :
4. Jabatan dalam KPRI :

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda check (\checkmark) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya !

No.	Pertanyaan	Terpisah			Tidak Terpisah
		4	3	2	
A.	Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Kas				
a)	Struktur Organisasi (Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai)				
1.	Bagaimana pemisahan fungsi penjualan dengan fungsi kas di KPRI Saudara ?				
2.	Bagaimana pemisahan fungsi kas dengan fungsi akuntansi di KPRI Saudara ?				
3.	Bagaimana pelaksanaan transaksi penjualan tunai oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi di KPRI Saudara ?				
	(Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang)				
4.	Bagaimana pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas di KPRI Saudara ?				
5.	Bagaimana pemisahan fungsi penerimaan kas dengan fungsi akuntansi di KPRI Saudara ?				
b)	Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan (Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai)				
6.	Bagaimana pengotorisasian penerimaan order dari pembeli oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai di KPRI Saudara ?				
7.	Bagaimana pengotorisasian penerimaan kas oleh fungsi kas				

	dengan cara membubuhi cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut di KPRI Saudara ?				
8.	Bagaimana pengotorisasian penyerahan barang oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai di KPRI Saudara ?				
9.	Bagaimana pengotorisasian pencatatan ke dalam buku jurnal oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Diberi Wewenang			Tidak diberi wewenang
		4	3	2	1
10.	Bagaimana pemberian wewenang pencatatan ke dalam catatan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Ditagih			Tidak ditagih
		4	3	2	1
11.	(Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang) Bagaimana fungsi penagihan melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Didasarkan			Tidak didasarkan
		4	3	2	1
12.	Bagaimana pendasaran pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) atas surat yang berasal dari debitur di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dipertanggung jawabkan			Tidak dipertanggung jawabkan
		4	3	2	1
c)	Praktik Yang Sehat (Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai)				
13.	Bagaimana pertanggungjawaban faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya oleh fungsi penjualan di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Disetor			Tidak disetor
		4	3	2	1
14.	Bagaimana penyetoran jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Diperiksa	←→		Tidak diperiksa
		4	3	2	1
15.	Bagaimana pemeriksaan perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas, secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern di KPRI Saudara?				

No	Pertanyaan	Direkam & disetor	←→		Tidak direkam & tidak disetor
		4	3	2	1
16.	(Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang) Bagaimana perekaman hasil perhitungan kas dalam berita acara perhitungan kas dan bagaimana penyetoran ke bank dengan segera di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Diasuransikan	←→		Tidak diasuransikan
		4	3	2	1
17.	Bagaimana pengasuransian dana penagih dan kasir di KPRI Saudara ?				
18.	Bagaimana pengasuransian kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa dan kas ada pada penagih) di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Terpisah	←→		Tidak terpisah
		4	3	2	1
B. Efektivitas Pengendalian Intern Pengeluaran Kas					
a) Struktur Organisasi					
19.	Bagaimana pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi akuntansi di KPRI Saudara ?				
20.	Bagaimana pelaksanaan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Mendapat otorisasi	←→		Tidak mendapat otorisasi
		4	3	2	1
b) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan					
21.	Bagaimana pendapatan otorisasi pengeluaran kas dari pejabat yang berwenang di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Mendapat persetujuan	←→		Tidak mendapat persetujuan
		4	3	2	1
22.	Bagaimana pendapatan persetujuan pembukaan dan penutupan rekening bank dari pejabat yang berwenang di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Mendapat otorisasi	↔		Tidak mendapat otorisasi
		4	3	2	1
23.	Bagaimana pendapatan otorisasi pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas yang didasarkan atas bukti kas keluar dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen yang lengkap di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dilindungi	↔		Tidak dilindungi
		4	3	2	1
c) 24.	Praktik Yang Sehat Bagaimana perlindungan saldo kas yang ada di tangan dari kemungkinan pencurian dan penggunaan yang tidak semestinya di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dibubuhi	↔		Tidak dibubuhi
		4	3	2	1
25.	Bagaimana pembubuhan cap “lunas” dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Diperiksa	↔		Tidak diperiksa
		4	3	2	1
26.	Bagaimana pemeriksaan penggunaan rekening koran bank (<i>bank statement</i>) yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh pemeriksa intern (<i>internal audit function</i>) yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dilakukan	↔		Tidak dilakukan
		4	3	2	1
27.	Bagaimana perlakuan semua pengeluaran kas dengan cek atas nama pemilik penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan di KPRI Saudara ?				
28.	Bagaimana perlakuan pengeluaran kas yang hanya menyangkut jumlah yang kecil atau pengeluaran sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil di KPRI Saudara ?				

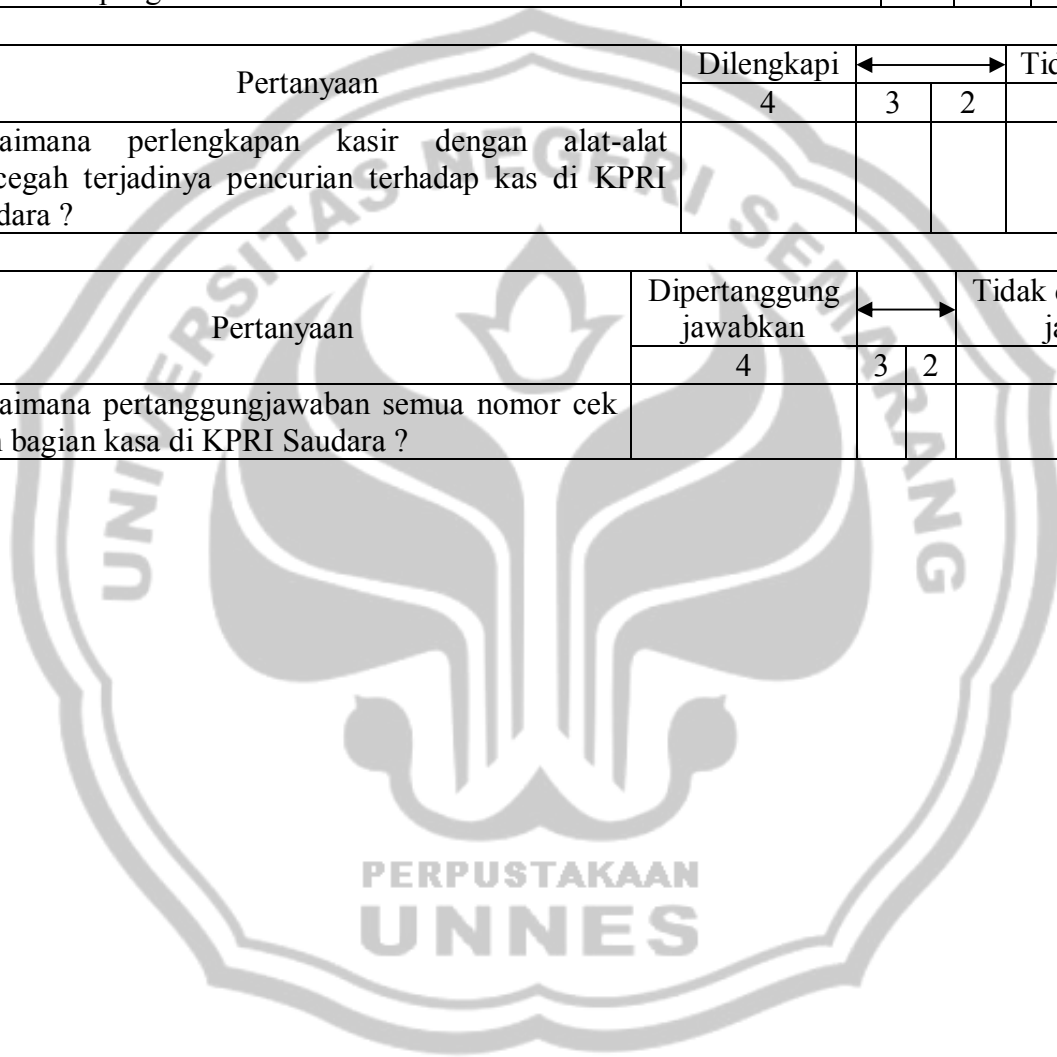
No	Pertanyaan	Diadakan	↔		Tidak diadakan
		4	3	2	1
29.	Bagaimana pengadaan secara periodik pencocokan jumlah kas yang ada di tangan dengan jumlah kas				

	menurut catatan akuntansi di KPRI Saudara ?				
--	---	--	--	--	--

No	Pertanyaan	Diasuransikan	↔		Tidak diasuransikan
		4	3	2	1
30.	Bagaimana pengasuransian kas yang ada di tangan (<i>cash in safe</i>) dan kas yang ada dalam perjalanan (<i>cash in transit</i>) dari kerugian di KPRI Saudara ?				
31.	Bagaimana pengasuransian Kasir di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dilengkapi	↔		Tidak dilengkapi
		4	3	2	1
32.	Bagaimana perlengkapan kasir dengan alat-alat pencegah terjadinya pencurian terhadap kas di KPRI Saudara ?				

No	Pertanyaan	Dipertanggung jawabkan	↔		Tidak dipertanggung jawabkan
		4	3	2	1
33.	Bagaimana pertanggungjawaban semua nomor cek oleh bagian kasa di KPRI Saudara ?				



Nama – Nama KPRI di Kecamatan Kota yang Menjadi Sampel

Penelitian

No.	Nama KPRI	Alamat
1.	Adhyaksa	Jl. Jendral Sudirman No. 41 Kudus
2.	Bina Karya	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus
3.	Bina Keluarga	Jl. Bakti No. 52 Kudus
4.	Budi Daya	Jl. Jendral Sudirman No. 182 Kudus
5.	Ganesha	Jl. Ganesha Purwosari Kudus
6.	Kandepag	Mlati Kidul No. 114 Kec. Kota Kab. Kudus
7.	Karya Disbun	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus
8.	Karya Bhakti Sejahtera	Jl. Pendowo No. 10 Mlati Lor Kudus
9.	Karya Utama	Jl. Jendral Sudirman No. 182 Kudus
10.	Keluarga Sejahtera	Jl. Sunan muria No. 10A Kudus
11.	Kencana	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus
12.	Kopegtel	Jl. Jendral Sudirman No. 69 Kudus
13.	Kudus I	Jl. R. M Sosrokartono No. 22B Kudus
14.	Lumintu	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus
15.	Makmur	Jl. Jendral Sudirman No. 76 Kudus
16.	Margodono	Jl. Pramuka 1/3 Kudus
17.	Muria	Jl. Simpang Tujuh No. 1 kudus
18.	Pengayoman (PN)	Jl. Sunan muria No. 1 Kudus
19.	Pengayoman (Rutan)	Jl. Sunan Kudus No. 70 Kudus
20.	Sedyo Makmur	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus
21.	Sehat	Jl. Diponegoro No. 15 Kudus
22.	SMA N 1 Kudus	Jl. Pramuka No. 14 Kudus
23.	SMK N 1 Kudus	Jl. Ganesha II Purwosari Kudus
24.	Suluh Sejahtera	Jl. KH. Agus Salim Kudus
25.	Sumber Sejahtera	Jl. Jendral Sudirman No. 82 Kudus
26.	Tunas Mekar	Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Kudus

Sumber : KPRI Kabupaten Kudus

Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Current Ratio*

Model Summary^b

		Model
		1
R		.585 ^a
R Square		.342
Adjusted R Square		.315
Std. Error of the Estimate		1.21678
Change Statistics	R Square Change	.342
	F Change	12.499
	df1	1
	df2	24
	Sig. F Change	.002

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.505	1	18.505	12.499	.002 ^a
	Residual	35.533	24	1.481		
	Total	54.038	25			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

		Model	
		1	
		(Constant)	X
Unstandardized Coefficients	B	-2.610	.053
	Std. Error	1.272	.015
Standardized Coefficients	Beta		.585
	t	-2.052	3.536
Sig.		.051	.002
Correlations	Zero-order		.585
	Partial		.585
	Part		.585
Collinearity Statistics	Tolerance		1.000
	VIF		1.000

a. Dependent Variable: Y1

**Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas
terhadap *Acid Test Ratio***

Model Summary^b

		Model
		1
R		.428 ^a
R Square		.184
Adjusted R Square		.150
Std. Error of the Estimate		.30045
Change Statistics	R Square Change	.184
	F Change	5.397
	df1	1
	df2	24
	Sig. F Change	.029

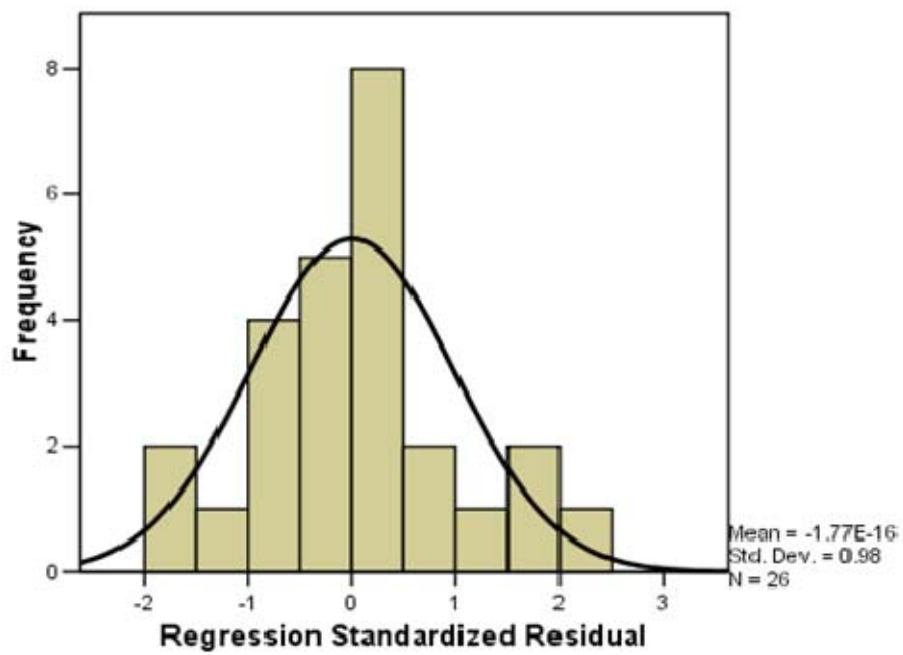
a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y2



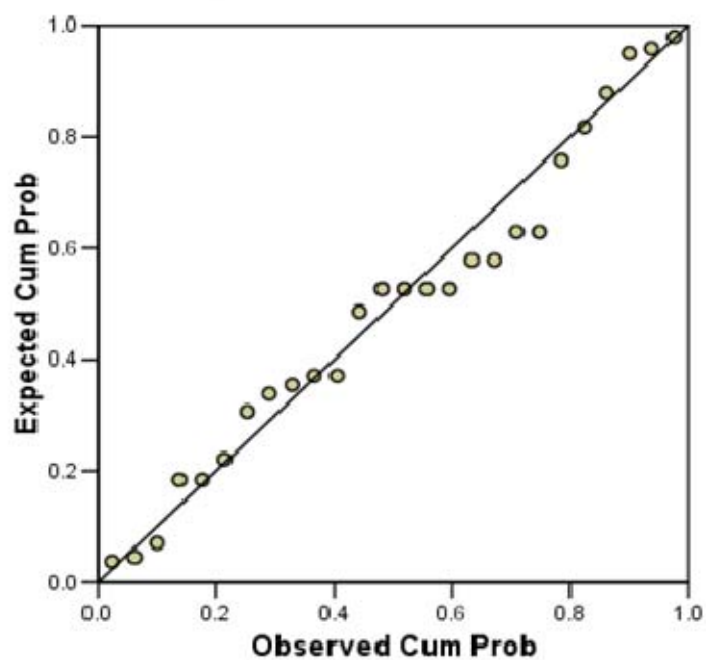
Histogram

Dependent Variable: Y1



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y1



ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.487	1	.487	5.397	.029 ^a
	Residual	2.167	24	.090		
	Total	2.654	25			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y2

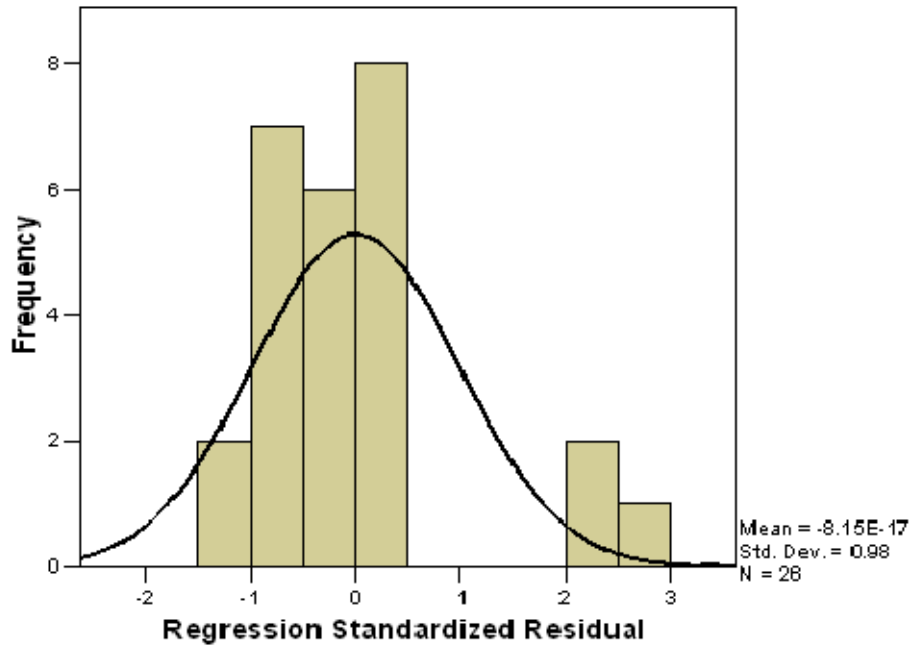
Coefficients^a

		Model	
		1	
		(Constant)	X
Unstandardized Coefficients	B	.399	.009
	Std. Error	.314	.004
Standardized Coefficients	Beta		.428
	t	1.269	2.323
	Sig.	.217	.029
Correlations	Zero-order		.428
	Partial		.428
	Part		.428
Collinearity Statistics	Tolerance		1.000
	VIF		1.000

a. Dependent Variable: Y2

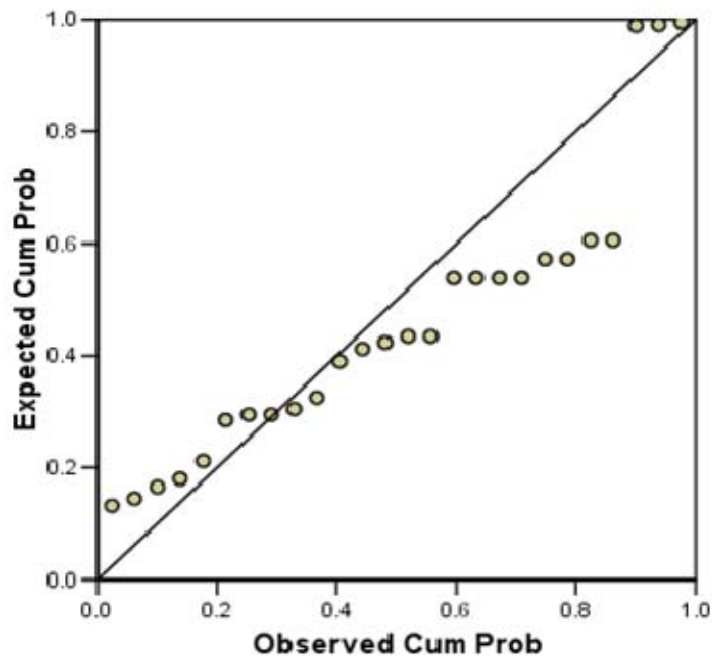
Histogram

Dependent Variable: Y2



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y2



Analisis Regresi Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap *Cash Ratio*

Model Summary^b

		Model
		1
R		.380 ^a
R Square		.130
Adjusted R Square		.094
Std. Error of the Estimate		1.38718
Change Statistics	R Square Change	.130
	F Change	3.583
	df1	1
	df2	24
	Sig. F Change	.070

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y3

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.995	1	6.995	3.583	.070 ^a
	Residual	46.851	24	1.952		
	Total	53.846	25			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y3

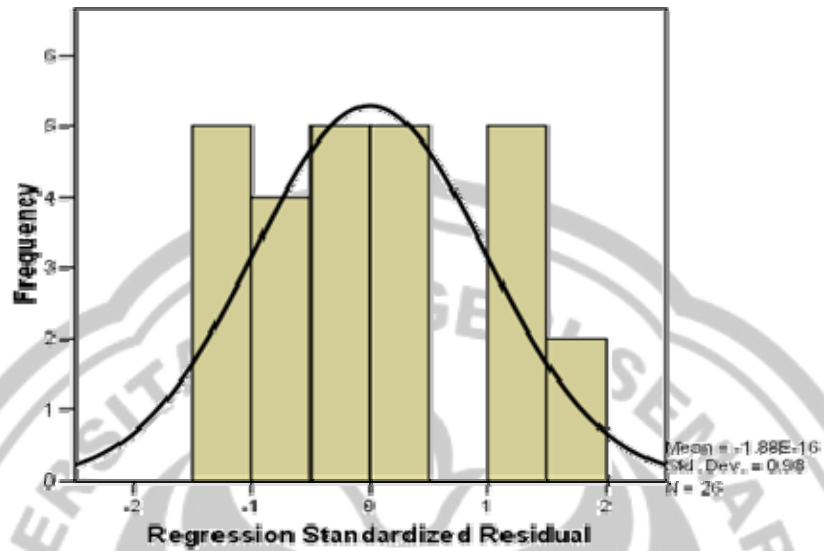
Coefficients^a

		Model	
		1	
		(Constant)	X
Unstandardized Coefficients	B	-.639	.033
	Std. Error	1.461	.017
Standardized Coefficients	Beta		.380
	t	-.437	1.893
Sig.		.688	.070
Correlations	Zero-order		.380
	Partial		.380
	Part		.380
Collinearity Statistics	Tolerance		1.000
	VIF		1.000

a. Dependent Variable: Y3

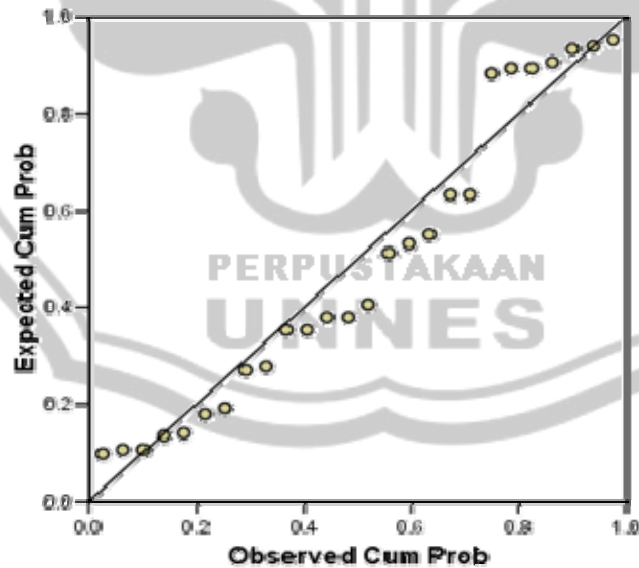
Histogram

Dependent Variable : Y3



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y3



Tabel Kritik Uji t

db	t _{0.995}	t _{0.99}	t _{0.975}	t _{0.95}	t _{0.925}	t _{0.90}	t _{0.75}	t _{0.70}	t _{0.60}	t _{0.55}
1	63.656	31.821	12.706	6.314	4.165	3.078	1.000	0.727	0.325	0.158
2	9.925	6.965	4.303	2.920	2.282	1.886	0.816	0.617	0.289	0.142
3	5.841	4.541	3.182	2.353	1.924	1.638	0.765	0.584	0.277	0.137
4	4.604	3.747	2.776	2.132	1.778	1.533	0.741	0.569	0.271	0.134
5	4.032	3.365	2.571	2.015	1.699	1.476	0.727	0.559	0.267	0.132
6	3.707	3.143	2.447	1.943	1.650	1.440	0.718	0.553	0.265	0.131
7	3.499	2.998	2.365	1.895	1.617	1.415	0.711	0.549	0.263	0.130
8	3.355	2.896	2.306	1.860	1.592	1.397	0.706	0.546	0.262	0.130
9	3.250	2.821	2.262	1.833	1.574	1.383	0.703	0.543	0.261	0.129
10	3.169	2.764	2.228	1.812	1.559	1.372	0.700	0.542	0.260	0.129
11	3.106	2.718	2.201	1.796	1.548	1.363	0.697	0.540	0.260	0.129
12	3.055	2.681	2.179	1.782	1.538	1.356	0.695	0.539	0.259	0.128
13	3.012	2.650	2.160	1.771	1.530	1.350	0.694	0.538	0.259	0.128
14	2.977	2.624	2.145	1.761	1.523	1.345	0.692	0.537	0.258	0.128
15	2.947	2.602	2.131	1.753	1.517	1.341	0.691	0.536	0.258	0.128
16	2.921	2.583	2.120	1.746	1.512	1.337	0.690	0.535	0.258	0.128
17	2.898	2.567	2.110	1.740	1.508	1.333	0.689	0.534	0.257	0.128
18	2.878	2.552	2.101	1.734	1.504	1.330	0.688	0.534	0.257	0.127
19	2.861	2.539	2.093	1.729	1.500	1.328	0.688	0.533	0.257	0.127
20	2.845	2.528	2.086	1.725	1.497	1.325	0.687	0.533	0.257	0.127
21	2.831	2.518	2.080	1.721	1.494	1.323	0.686	0.532	0.257	0.127
22	2.819	2.508	2.074	1.717	1.492	1.321	0.686	0.532	0.256	0.127
23	2.807	2.500	2.069	1.714	1.489	1.319	0.685	0.532	0.256	0.127
24	2.797	2.492	2.064	1.711	1.487	1.318	0.685	0.531	0.256	0.127
25	2.787	2.485	2.060	1.708	1.485	1.316	0.684	0.531	0.256	0.127
26	2.779	2.479	2.056	1.706	1.483	1.315	0.684	0.531	0.256	0.127
27	2.771	2.247	2.052	1.703	1.482	1.314	0.684	0.531	0.256	0.127
28	2.763	2.467	2.048	1.701	1.480	1.313	0.683	0.530	0.256	0.127
29	2.756	2.462	2.045	1.699	1.479	1.311	0.683	0.530	0.256	0.127
30	2.750	2.457	2.042	1.697	1.477	1.310	0.683	0.530	0.256	0.127
31	2.744	2.453	2.040	1.696	1.476	1.309	0.682	0.530	0.256	0.127
32	2.738	2.449	2.037	1.694	1.475	1.309	0.682	0.530	0.256	0.127
33	2.733	2.445	2.035	1.692	1.474	1.308	0.682	0.530	0.256	0.127
34	2.728	2.441	2.032	1.691	1.473	1.307	0.682	0.529	0.256	0.127
35	2.724	2.438	2.030	1.690	1.472	1.306	0.682	0.529	0.256	0.127

Sumber : Exel for Windows (=TINV(5%;df))

ANGKET PENELITIAN

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Pengurus KPRI

Kabupaten Kudus

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan diadakannya penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas Terhadap Likuiditas Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”. Dengan ini saya bermaksud mengumpulkan data guna menyelesaikan studi yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Negeri Semarang.

Untuk memperoleh data, saya mohon bantuan Saudara untuk mengisi angket yang telah disediakan pada halaman lampiran. Pengisian angket mohon diisi yang sebenar-benarnya karena tidak mempengaruhi kedudukan, harkat dan martabat Saudara, baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.

Demikian permohonan saya, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 07 Februari 2007

Peneliti

Ana Sufiyanti
NIM. 3351402576